

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL KALIMANTAN TENGAH 2014



STATISTIK KETAHANAN SOSIAL KALIMANTAN TENGAH 2014



STATISTIK KETAHANAN SOSIAL KALIMANTAN TENGAH 2014

ISBN : 978-602-6774-08-8
No. Publikasi : 62520.1507
Katalog BPS : 3201021.62
Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 98 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Tim Penyusunan Naskah:

Penanggung Jawab Umum : Sukardi
Koordinator : Syafi'i Nur
Anggota : Yanis Habibie
Iskandar
Mulya Setiawan
Ikhlas Mukmin
Radian

Gambar Kulit dan Tata Letak :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Koordinator : Bob Setiabudi
Tata Letak : Yoga Sasmita
Vina Natalia
Gambar Kulit : Eddy Surahman

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

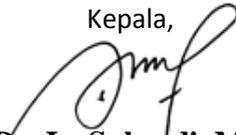
Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Kalimantan Tengah 2014 merupakan hasil kompilasi data primer dan sekunder. Adapun informasi statistik yang disajikan antara lain: politik dan keamanan, lingkungan hidup, kemiskinan, dan indeks demokrasi.

Diharapkan publikasi ini akan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam perencanaan, penentuan dan evaluasi kebijakan, maupun untuk keperluan penelitian atau analisis data. Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Meskipun publikasi ini sudah dipersiapkan secara baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan kekurangan atau kekeliruan. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari setiap pengguna publikasi ini guna untuk penyempurnaan di masa mendatang, akan sangat diharapkan.

Palangka Raya, November 2015
BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala,



Dr. Ir. Sukardi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xi
BAB I Politik Dan Keamanan	1
1.1. Politik	4
1.1.1. Pemerintah Daerah	4
1.1.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	9
1.2. Keamanan	15
BAB II Lingkungan Hidup	25
2.1. Latar Belakang	27
2.2. Konsep Dan Definisi	32
2.3. Lingkungan Alam	38
2.3.1. Iklim Dan Kualitas Udara	39
2.3.2. Sumber Daya Hutan	43
2.3.3. Sumber Daya Air	47
2.3.4. Sumber Daya Ikan	50
2.3.5. Keanekaragaman Hayati	52
2.3.6. Bencana Alam	55
2.4. Lingkungan Buatan	58
2.4.1. Perikanan	58
2.4.2. Kehutanan	60
2.4.3. Limbah Padat	63
2.4.4. Transportasi	65
2.4.5. Perumahan	67
BAB III Kemiskinan	73

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan	76
3.2. Perubahan Garis Kemiskinan	77
3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan	80
3.4. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Di Pulau Kalimantan	82
BAB IV Indeks Demokrasi	85
4.1. Latar Belakang	87
4.2. Arti Penting Dan Manfaat Indeks Demokrasi	90
4.3. Aspek, Variabel, Dan Indikator Indeks Demokrasi	91
4.4. Indeks Demokrasi Provinsi Menurut Aspek	94
4.5. Indeks Demokrasi Di 33 Provinsi.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Kandidat dan Persentase Perolehan Suara Pada Pilkada Terakhir Menurut Kabupaten/Kota.....	6
Tabel 1.2.	Jumlah PNS Menurut Kabupaten/Kota dan Eselon, 2014	7
Tabel 1.3.	Jumlah Hakim dan Jaksa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014.....	8
Tabel 1.4.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota, Pendidikan Terakhir, dan Jenis Kelamin, 2014.....	10
Tabel 1.5.	Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota, 2014	17
Tabel 1.6.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2014	19
Tabel 1.7.	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2014	20
Tabel 1.8.	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2014 (detik)	22
Tabel 1.9.	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 1.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2014	23
Tabel 2.1.	Kedaaan Iklim Stasiun Tjilik Riwut Palangka Raya, 2011-2014.....	40
Tabel 2.2.	Analisis Air Hujan di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya, 2011-2013.....	41
Tabel 2.3.	Rata-rata Bulanan Konsentrasi Partikel Terlarut di Udara Menurut Bulan di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya, 2011-2013 ($\mu\text{gr}/\text{m}^3/24 \text{ jam}$)	42
Tabel 2.4.	Luas dan Kondisi Hutan Mangrove Kalimantan Tengah, 2014.....	45
Tabel 2.5.	Luas Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisannya, 2007-2012 (Ha)	46

Tabel 2.6.	Luas Daerah Pengaliran dan Debit di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 1.000 km ² , 2010.....	49
Tabel 2.7.	Rata-rata Harian Aliran Sungai, Tinggi Aliran, dan Volume Air di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 1.000 km ² , 2010	50
Tabel 2.8.	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Perairan (Ton), 2009-2012.....	51
Tabel 2.9.	Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Menurut Jenis Konservasi, 2010-2011	54
Tabel 2.10.	Frekuensi Gempa Berdasarkan Kedalaman dan Kekuatan Menurut Pulau, 2013	56
Tabel 2.11.	Jumlah Bencana Alam Menurut Jenisnya, 2012-2013.....	57
Tabel 2.12.	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Digunakan di Kolam dan Tambak Menurut Jenis Pupuk dan Obat (Kg), 2008-2009.....	59
Tabel 2.13.	Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut Menurut Jenis Perahu/Kapal (Unit), 2008-2009.....	60
Tabel 2.14.	Produksi Kayu Menurut Jenisnya (m ³ /cum), 2009-2012.....	61
Tabel 2.15.	Kegiatan Penyelamatan Lingkungan, 2010-2012.....	62
Tabel 2.16.	Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut Per Hari serta Sarana Dinas Kebersihan di Kota Palangka Raya, 2013-2014.....	64
Tabel 2.17.	Persentase Desa yang Mengalami Gangguan Lingkungan dan Mengadu ke Kepala Desa Menurut Jenis Gangguan, 2005- 2011	65
Tabel 2.18.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Bermotor, 2010-2013.....	66
Tabel 2.19.	Jumlah Rumah yang Dibangun oleh Perumnas Menurut Jenis Rumah, 2010-2012	67
Tabel 2.20.	Jumlah dan Persentase Desa Menurut Keberadaan Keluarga yang Tinggal di Bantaran Sungai dan di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, 2011	68

Tabel 2.21.	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan, 2011-2014.....	69
Tabel 2.22.	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Sumber Penerangan, 2011-2014.....	71
Tabel 3.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2007-2015.....	77
Tabel 3.2.	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Komoditi, 2007-2015	79
Tabel 3.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2007-2015	81
Tabel 3.4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan, 2015.....	83
Tabel 4.	Indeks Aspek pada Provinsi dengan Indeks Demokrasi Tertinggi dan Terendah, 2014.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Persentase Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014.....	11
Gambar 1.2. Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Menurut Kabupaten/Kota, 2013	13
Gambar 1.3. Persentase Alokasi Anggaran Kesehatan dalam APBD Menurut Kabupaten/Kota, 2013	15
Gambar 1.4. Jumlah Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014	18
Gambar 1.5. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2014.....	21
Gambar 2.1. Luas Penutupan Lahan Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM+ (000 Ha), 2009-2010 dan 2011-2012	44
Gambar 2.2. Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi oleh Satelit NOAA, 2008-2012.....	46
Gambar 2.3. Banyaknya Kunjungan Kapal Pelayaran Dalam dan Luar Negeri, 2009-2012.....	66
Gambar 3.1. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2007-2015	76
Gambar 3.2. Persentase Garis Kemiskinan Menurut Jenis Komoditi, 2007-2015	78
Gambar 4.1. Indeks Demokrasi Provinsi Menurut Aspek, 2014	95
Gambar 4.2. Indeks Demokrasi Provinsi, 2014	97



POLITIK DAN KEAMANAN

<http://kulteng.lps.go.id>

1. Politik Dan Keamanan

Lebih dari 30 tahun sejak pemerintahan Orde Baru, Indonesia dikelola dengan sistem ketatanegaraan yang terpusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan lokal. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, serta dihuni oleh penduduk terbesar keempat dunia setelah China, India, dan Amerika, juga menjadi hambatan pada jangkauan pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan dengan konsentrasi dan kualitas yang merata. Pada tahun 1999 kesadaran tersebut memunculkan gagasan untuk melakukan desentralisasi. Pentingnya desentralisasi juga karena didorong adanya keterbatasan birokrasi pemerintah sendiri, yang dimaknai sebagai prinsip dimana keputusan yang menyangkut masyarakat sebisa mungkin dibuat oleh pejabat yang tingkatnya paling dekat dengan rakyat.

Gagasan tersebut muncul utamanya dengan semakin terbukanya sistem politik untuk mengadopsi demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan. Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah dianggap dapat menjawab salah satu prasyarat penting dalam demokrasi, yaitu adanya partisipasi rakyat. Dari perspektif *state-society relation*, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil (*civil society*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

Selain merupakan kebutuhan sosial, rasa aman (*security*) juga merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak terukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, termasuk aspek dan dimensi politik, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*) Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

1.1. Politik

1.1.1. Pemerintah Daerah

Pemberlakuan Otonomi Daerah membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut, kebijakan-kebijakan daerah akan dibuat lebih dekat dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Implikasinya, daerah-daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota yang wilayahnya terlalu besar dimekarkan menjadi beberapa daerah untuk efektifitas pemerintahan daerah. Dinamika politik lokal juga ditandai dengan keleluasaan masyarakat memilih pemimpin seperti Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung melalui Pilkada.

Indonesia telah menempuh berbagai langkah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Dari aspek regulasi dimulai dengan beberapa pengesahan Undang-Undang seperti UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara yang berisi pengaturan agar struktur lembaga dapat efektif dan efisien. Demikian juga dengan disahkannya UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, serta UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan bagian dari usaha mempercepat reformasi birokrasi. Dalam itikad yang sama, terdapat 7 Undang-Undang lain yang masih dalam proses pembahasan; RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika Penyelenggara Negara, RUU Sistem Pengawasan Nasional, RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara, RUU Kepegawaian Negara, RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta RUU Badan Layanan Umum.

Usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) dengan penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan sistem penilaian prestasi kerja PNS, serta pengembangan pola karir dalam jabatan struktural (Renstra KEMENPAN & RB 2010-2014:8). Langkah memperbanyak tenaga fungsional dan pengembangan sistem penilaian prestasi kerja dapat membantu membangun budaya organisasi yang lebih sehat. Bukan hanya berdampak internal, budaya organisasi yang sehat juga dapat mendukung kemampuan aparatur negara dan lembaga pemerintah untuk adaptif terhadap tantangan eksternal.

Tabel 1.1. Jumlah Kandidat dan Persentase Perolehan Suara Pada Pilkada Terakhir Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Terpilih	
		Suara Sah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	2	55 281	45,14
Kotawaringin Timur	7	62 764	38,06
Kapuas	3	77 166	47,36
Barito Selatan	7	15 832	23,08
Barito Utara	7	27 232	38,50
Sukamara	5	13 276	48,97
Lamandau	3	21 464	59,94
Seruyan	2	42 226	53,65
Katingan (2 putaran)	6	41 886	61,61
Pulang Pisau	3	34 467	52,47
Gunung Mas	4	30 084	50,96
Barito Timur	6	18 991	31,89
Murung Raya	3	26 277	33,52
Palangka Raya	6	33 146	31,52
Provinsi (Gubernur)	4	433 087	42,28

Sumber: KPUD

Penataan dan distribusi sumber daya manusia aparatur negara juga mendapat perhatian yang besar. Pada 24 Agustus 2011 ditandatangani surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk moratorium penerimaan PNS yang berlaku dari tanggal 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Demikian juga dengan munculnya himbuan untuk pensiun dini bagi PNS,

menjadi sebuah kesatuan untuk melakukan perampingan dan penataan organisasi pemerintahan. Rekrutmen PNS baru diproyeksikan melalui analisis kebutuhan jabatan yang ketat serta berbasis kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Standar tingkat pendidikan yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Dengan terbitnya PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007, pemerintah memutuskan untuk mengangkat semua tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, seluruh pimpinan instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat tenaga honorer, kecuali diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tabel 1.2. menyajikan distribusi jumlah PNS yang mempunyai jabatan struktural menurut kabupaten/kota dan eselon.

Tabel 1.2. Jumlah PNS Menurut Kabupaten/Kota dan Eselon, 2014

Kabupaten/Kota	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	33	147	506
Kotawaringin Timur	34	197	727
K a p u a s	33	183	709
Barito Selatan	33	143	527
Barito Utara	30	147	520
Sukamara	20	105	218
Lamandau	32	142	296
Seruyan	29	142	310
Katingan	31	143	384
Pulang Pisau	30	132	280
Gunung Mas	27	126	389
Barito Timur	26	147	503
Murung Raya	28	138	363
Palangka Raya	35	156	639
Provinsi	50	268	691

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan undang-undang. Kekuasaan kehakiman yang akan menjamin amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Selain Mahkamah Agung (MA), dalam Pasal 24 hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru yang kedudukannya sederajat dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Dalam tabel 1.3 disajikan jumlah hakim dan jaksa menurut jenis kelamin, dimana baik hakim maupun jaksa masih didominasi oleh laki-laki.

Tabel 1.3. Jumlah Hakim dan Jaksa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014

Kabupaten/Kota	Hakim		Jaksa	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	5	2	10	2
Kotawaringin Timur	11	-	8	3
K a p u a s	6	2	10	3
Barito Selatan	6	-	8	-
Barito Utara	7	-	8	1
Sukamara	tidak ada pengadilan		6	7
Lamandau	tidak ada pengadilan		7	9
Seruyan	tidak ada pengadilan		8	7
Katingan	6	2	8	2
Pulang Pisau	tidak ada pengadilan		8	6
Gunung Mas	tidak ada pengadilan		8	7
Barito Timur	4	2	7	-
Murung Raya	tidak ada pengadilan		8	9
Palangka Raya	17	5	7	8
Pengadilan Tinggi	18	3		
Kejaksaan Tinggi			48	6

Sumber: Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi

1.1.2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang diberlakukan sejak 1 Januari 2001 telah mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ada dua bentuk perubahan besar terjadi yaitu *pertama*, penghapusan sistem pemerintahan bertingkat sebagaimana ditetapkan oleh UU 5/1974. UU 22/1999 tentang sistem pemerintahan daerah memberikan otonomi luas pada daerah Kabupaten dan Kota (dulu disebut sebagai Kabupaten dan Kotamadya atau Dati II). Sedangkan Provinsi diberikan otonomi terbatas. Tidak ada hubungan hierarki Provinsi dengan Kabupaten/Kota. *Kedua*, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah mempunyai peranan jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Dia berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan keberhasilan sistem pemerintahan daerah yang baru ini yang disebut juga aturan tentang “otonomi daerah”, Pemerintah melakukan perubahan yang besar pula dalam Hubungan Keuangan Pusat - Daerah yang diatur oleh UU 25/1999. Pemerintah, berdasarkan undang-undang tersebut memberikan bantuan dan sumbangan pada Daerah dalam bentuk “Dana Alokasi Umum (DAU)”. Penggunaan dana ini sepenuhnya ditentukan oleh Daerah (Pemerintah Daerah bersama DPRD). Sehingga dengan demikian keberhasilan penggunaan dana tersebut ditentukan oleh Pemerintahan Daerah.

PP 105/2000 yang merupakan ketentuan pelaksanaan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah menetapkan berbagai aturan tentang “pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah”. Peraturan Pemerintah ini secara rinci memuat berbagai ketentuan penggunaan Keuangan Daerah yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan pengawasan. Wadahnya

disebut sebagai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ditetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Peranan DPRD sebagai Badan Perwakilan Rakyat di Daerah adalah besar sekali.

Tabel 1.4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota, Pendidikan Terakhir, dan Jenis Kelamin, 2014

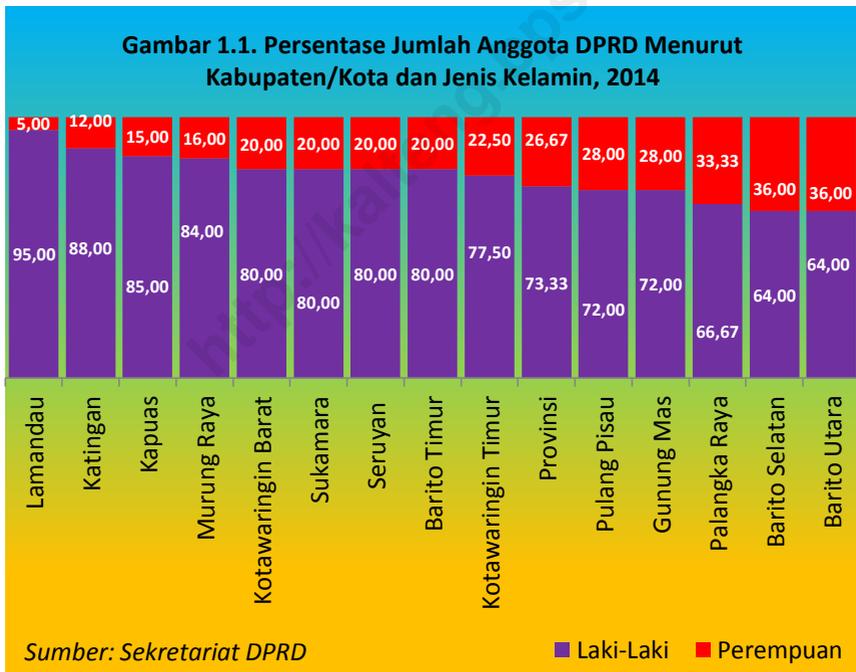
Kabupaten/Kota	Pendidikan Terakhir							
	SLTA ke bawah		D1 - D3		S1		S2 - S3	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kotawaringin Barat	9	4	-	-	12	1	2	1
Kotawaringin Timur	15	6	-	-	16	3	-	-
K a p u a s	14	1	-	-	15	5	5	-
Barito Selatan	9	3	1	-	8	3	1	-
Barito Utara	5	3	-	1	7	3	4	2
Sukamara	11	3	1	-	4	1	-	-
Lamandau	13	1	1	-	5	-	-	-
Seruyan	9	4	-	-	11	1	-	-
Katingan	10	-	3	1	8	2	1	-
Pulang Pisau	3	3	-	-	11	2	4	2
Gunung Mas	12	1	-	-	6	6	-	-
Barito Timur	10	1	2	-	6	3	2	1
Murung Raya	4	-	-	-	10	2	7	2
Palangka Raya	6	1	-	-	12	8	2	1
Provinsi	3	-	1	-	18	5	11	7

Sumber: Sekretariat DPRD

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundangundangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi, perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.



Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase anggota DPRD perempuan tertinggi di DPRD Barito Utara dan Barito Selatan yang mencapai 36 persen, sedangkan yang terendah di DPRD Lamandau yang hanya sebesar

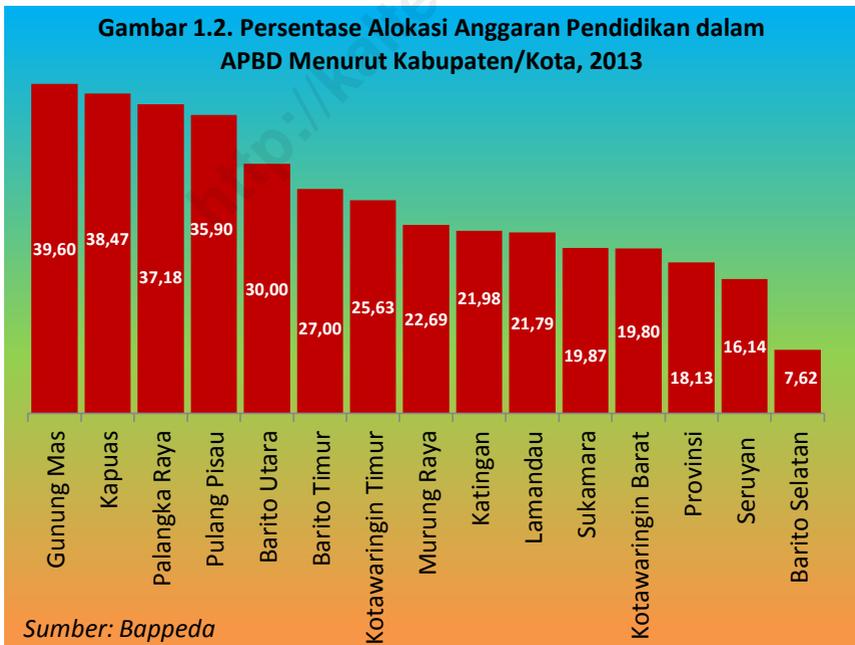
5,00 persen. Untuk anggota DPRD provinsi sendiri hanya sebesar 26,67 persen yang perempuan.

Amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya UU Sisdiknas yang mengamanatkan agar dana pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, maka menyebabkan beban penerimaan negara yang berat. Sebagai kompensasinya, maka perlu peningkatan kualitas belanja publik di sektor pendidikan.

Ada 2 komponen yang tidak boleh dimasukkan dalam Alokasi Anggaran Pendidikan. Pertama adalah komponen pendidikan kedinasan. Secara substansial, menghitung anggaran pendidikan tidak diperkenankan memasukkan komponen anggaran pendidikan kedinasan (*in-service training*). Hal ini disebabkan bertentangan dengan konvensi internasional UNESCO tentang cara menghitung anggaran pendidikan suatu negara yang hanya mencakup pendidikan formal yang bersifat *pre-service* program. Konvensi internasional ini harus digunakan karena: (1) menjadi standar internasional statistik pendidikan; (2) dipergunakan untuk melakukan perbandingan antar negara; (3) sebagai "*policy tool*" dan "*benchmarking*" pemerintah dalam memberikan layanan minimal terhadap kebutuhan dasar di bidang pendidikan; dan (4) kesamaan persepsi internasional dalam memberikan layanan terhadap hak memperoleh pendidikan sebagai salah satu hak azasi manusia yang merupakan "*the most enabling of rights which if accomplished makes great progress towards achieving other rights*" seperti yang dicetuskan dalam Konferensi Global di bidang Pendidikan yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2004.

Kedua, komponen gaji guru dan tenaga kependidikan. Komponen ini tidak dapat dimasukkan dalam anggaran pendidikan 20 persen karena

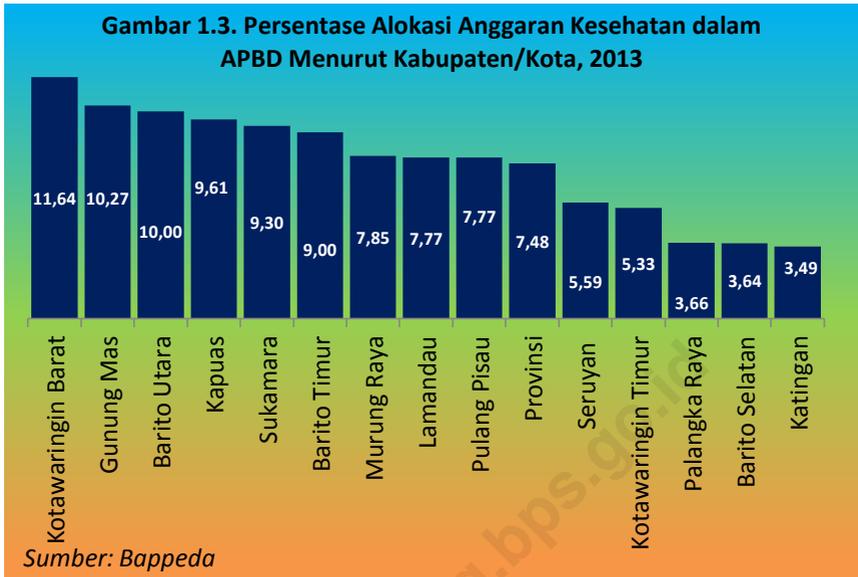
termasuk dalam anggaran rutin. Hal ini juga telah dicantumkan dalam Pasal 49 Ayat 1 UU Sisdiknas yang menyebutkan "Dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD." Hal ini didasari pendapat bahwa jika anggaran untuk gaji dimasukkan, maka biaya operasional dan investasi atau pembangunan pendidikan menjadi lebih kecil karena telah terambil oleh anggaran untuk gaji yang sangat tinggi proporsinya dalam anggaran pendidikan. Dari gambar 1.2 terlihat bahwa persentase anggaran pendidikan tertinggi di Kabupaten Gunung Mas yang mencapai 39,60 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Barito Selatan yang hanya sebesar 7,62 persen. Ada 4 kabupaten dengan alokasi anggaran pendidikan yang kurang dari 20 persen, yaitu Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Barito Selatan.



Salah satu poin penting yang diatur dalam UU kesehatan yang baru adalah adanya pengakuan yang lebih tegas tentang pentingnya melihat kesehatan sebagai bagian dari HAM yang harus dipenuhi oleh pemerintah (Pasal 4-8). Pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan tercermin dalam alokasi anggaran Negara (APBN/APBD) Dalam UU Kesehatan 2009 diatur secara konkrit, yaitu pemenuhan alokasi anggaran kesehatan untuk pusat (APBN) sebesar 5% (Pasal 171 ayat 1) dan untuk daerah (APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) menyiapkan 10% dari total anggaran setiap tahunnya diluar gaji pegawai (Pasal 171 ayat 2).

Besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik (terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar) yang besarnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 171 ayat 3). Bahkan lebih jauh lagi, ruang lingkup pelayanan kesehatan harus mencakup setiap upaya kesehatan yang menjadi komitmen komunitas global, regional, nasional maupun lokal.

Hal ini sebetulnya sudah memenuhi harapan organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menyebutkan, jumlah alokasi anggaran di sektor kesehatan yaitu minimal sekitar lima persen dari anggaran suatu negara.



Dari gambar di atas terlihat bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat dengan persentase anggaran kesehatan tertinggi yang mencapai 11,64 persen sedangkan yang terendah hanya sebesar 3,49 persen di Katingan.

1.2. Keamanan

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik

Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Keamanan suatu wilayah tidak terlepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1 Polda, 14 Polres/Polresta, 89 Polsek/Polsekta dan 11 Pos Polisi yang didukung sebanyak 6.429 personil polisi dengan rasio penduduk per polisi sebesar 379,51 yang artinya satu personel polisi menjamin keamanan 380 penduduk.

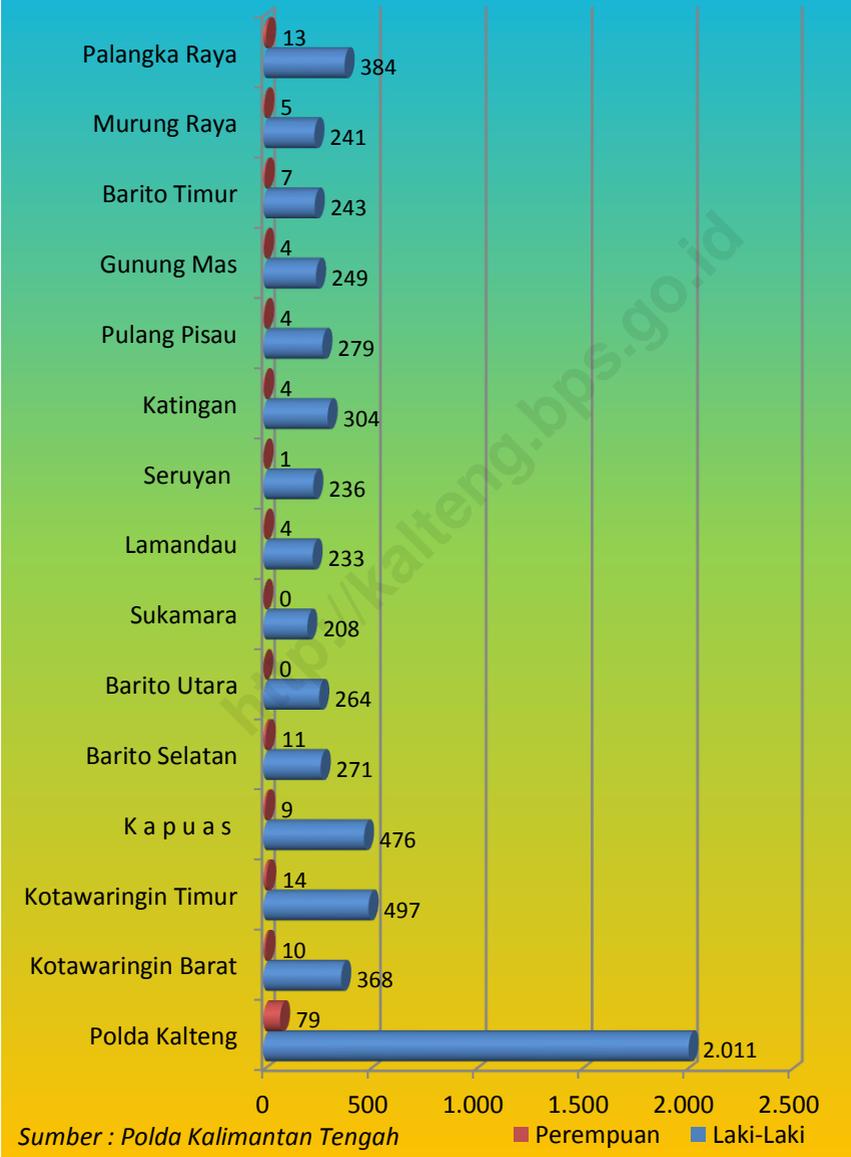
Tabel 1.5. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Polres/Polresta	Polsek/Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	1	6	-
Kotawaringin Timur	1	12	1
K a p u a s	1	12	1
Barito Selatan	1	6	-
Barito Utara	1	6	1
Sukamara	1	3	3
Lamandau	1	3	1
Seruyan	1	5	1
Katingan	1	9	-
Pulang Pisau	1	7	1
Gunung Mas	1	6	-
Barito Timur	1	6	-
Murung Raya	1	5	1
Palangka Raya	1	3	1
Kalimantan Tengah	14	89	11

Sumber: Polda Kalimantan Tengah

Dari gambar 1.4 juga terlihat bahwa personel polisi masih didominasi oleh laki-laki, bahkan di Sukamara dan Barito Utara tidak ada Polisi Wanita (Polwan) sama sekali. Secara umum di Kalimantan Tengah persentase Polwan hanya sebesar 2,57 persen.

Gambar 1.4. Jumlah Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014



Selama periode tahun 2013-2014, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Kalimantan Tengah cenderung mengalami peningkatan. Seperti yang disajikan pada Tabel 1.6, jumlah kejadian kejahatan yang dilaporkan atau *crime total* dari sebesar 3.248 kasus pada tahun 2013 menurun menjadi 4.137 kasus pada tahun 2014. Jumlah kejahatan terbanyak di Kotawaringin Timur mencapai 697 kasus dan terendah di Sukamara yang hanya 62 kasus.

Tabel 1.6. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2014

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Polda Kalimantan Tengah	156	154	196	180
Kotawaringin Barat	362	612	437	540
Kotawaringin Timur	378	796	448	697
K a p u a s	350	342	307	489
Barito Selatan	162	197	139	208
Barito Utara	218	269	233	196
Sukamara	59	86	51	62
Lamandau	86	127	131	126
Seruyan	87	107	101	137
Katingan	133	227	210	329
Pulang Pisau	98	317	110	194
Gunung Mas	113	176	112	120
Barito Timur	199	282	167	227
Murung Raya	65	99	75	87
Palangka Raya	684	1 002	531	545
Kalimantan Tengah	3 150	4 793	3 248	4 137

Sumber: Polda Kalimantan Tengah

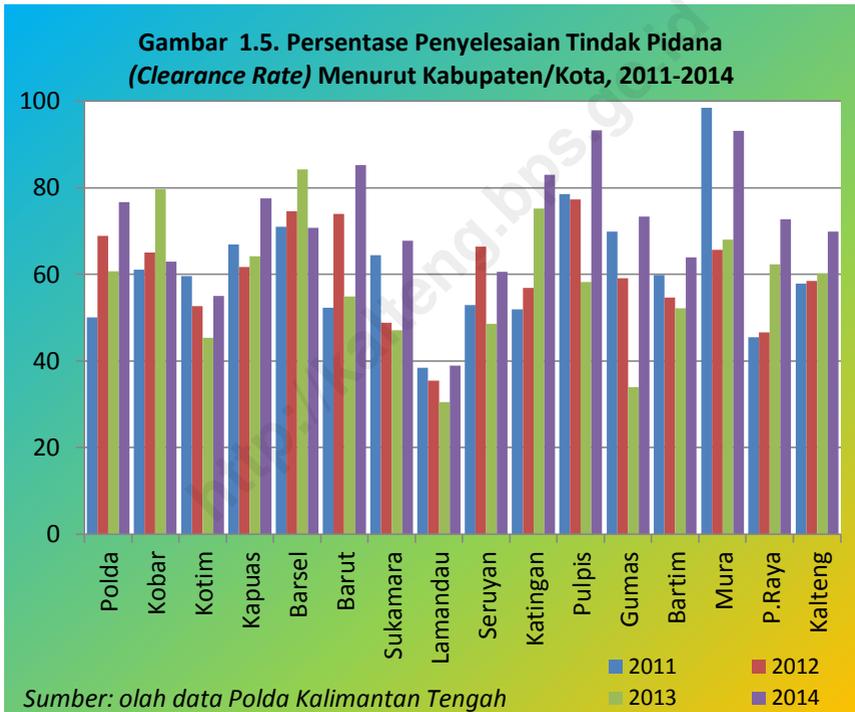
Ada perbedaan pola jumlah kejahatan yang dilaporkan antara periode 2012-2013 dengan 2013-2014. Selama periode 2012-2013 hanya ada 1 polres yang mengalami peningkatan jumlah kejahatan yaitu Lamandau. Sebaliknya selama periode 2013-2014 hampir semua polres mempunyai pola perkembangan *crime total* meningkat, hanya Barito Utara dan Lamandau yang mengalami penurunan.

Tabel 1.7. Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kabupaten/ Kota, 2011-2014

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Polda Kalimantan Tengah	78	106	119	138
Kotawaringin Barat	221	398	348	340
Kotawaringin Timur	225	419	203	383
K a p u a s	234	211	197	379
Barito Selatan	115	147	117	147
Barito Utara	114	199	128	167
Sukamara	38	42	24	42
Lamandau	33	45	40	49
Seruyan	46	71	49	83
Katingan	69	129	158	273
Pulang Pisau	77	245	64	181
Gunung Mas	79	104	38	88
Barito Timur	119	154	87	145
Murung Raya	64	65	51	81
Palangka Raya	311	467	331	396
Kalimantan Tengah	1 823	2 802	1 954	2 892

Sumber: Polda Kalimantan Tengah

Dari gambar 1.5 terlihat bahwa jumlah kejahatan yang diselesaikan dan persentase penyelesaian kejahatan secara total berfluktuasi dari tahun ke tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2014. Dari 14 polres/polresta yang ada di Kalimantan Tengah hanya 2 Polres saja yang selalu mengalami peningkatan persentase penyelesaian tindak pidana, yaitu Katingan dan Palangka Raya. Sedangkan Polres yang mengalami penurunan persentase penyelesaian tindak pidana selama periode 2013-2014 yaitu Kotawaringin Barat dan Barito Selatan.



Tabel 1.8 menunjukkan bahwa interval waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) ada kecenderungan menurun, dari sebesar 10.011 detik pada 2011 menjadi sebesar 7.623 detik pada tahun 2014. Interval waktu yang semakin tinggi menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin rendah. Kabupaten Sukamara dengan *crime clock* tertinggi yang mencapai 508.645 detik yang mengindikasikan intensitas tindak kejahatan

yang paling rendah jika dibandingkan kabupaten yang lainnya. Sedangkan Kotawaringin Timur dengan intensitas kejahatan tertinggi yang mencapai 45.245 detik, yang berarti tiap 12 jam 34 menit 5 detik terjadi suatu tindak pidana.

Tabel 1.8. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2014 (detik)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	87 116	51 529	72 165	58 400
Kotawaringin Timur	83 429	39 618	70 393	45 245
K a p u a s	90 103	92 211	102 723	64 491
Barito Selatan	194 667	160 081	226 878	151 615
Barito Utara	144 661	117 234	135 348	160 898
Sukamara	534 508	366 698	618 353	508 645
Lamandau	366 698	248 315	240 733	250 286
Seruyan	362 483	294 729	312 238	230 190
Katingan	237 113	138 925	150 171	95 854
Pulang Pisau	321 796	99 483	286 691	162 557
Gunung Mas	279 080	179 182	281 571	262 800
Barito Timur	158 472	111 830	188 838	138 925
Murung Raya	485 169	318 545	420 480	362 483
Palangka Raya	46 105	31 473	59 390	57 864
Kalimantan Tengah	10 011	6 580	9 709	7 623

Sumber: olah data Polda Kalimantan Tengah

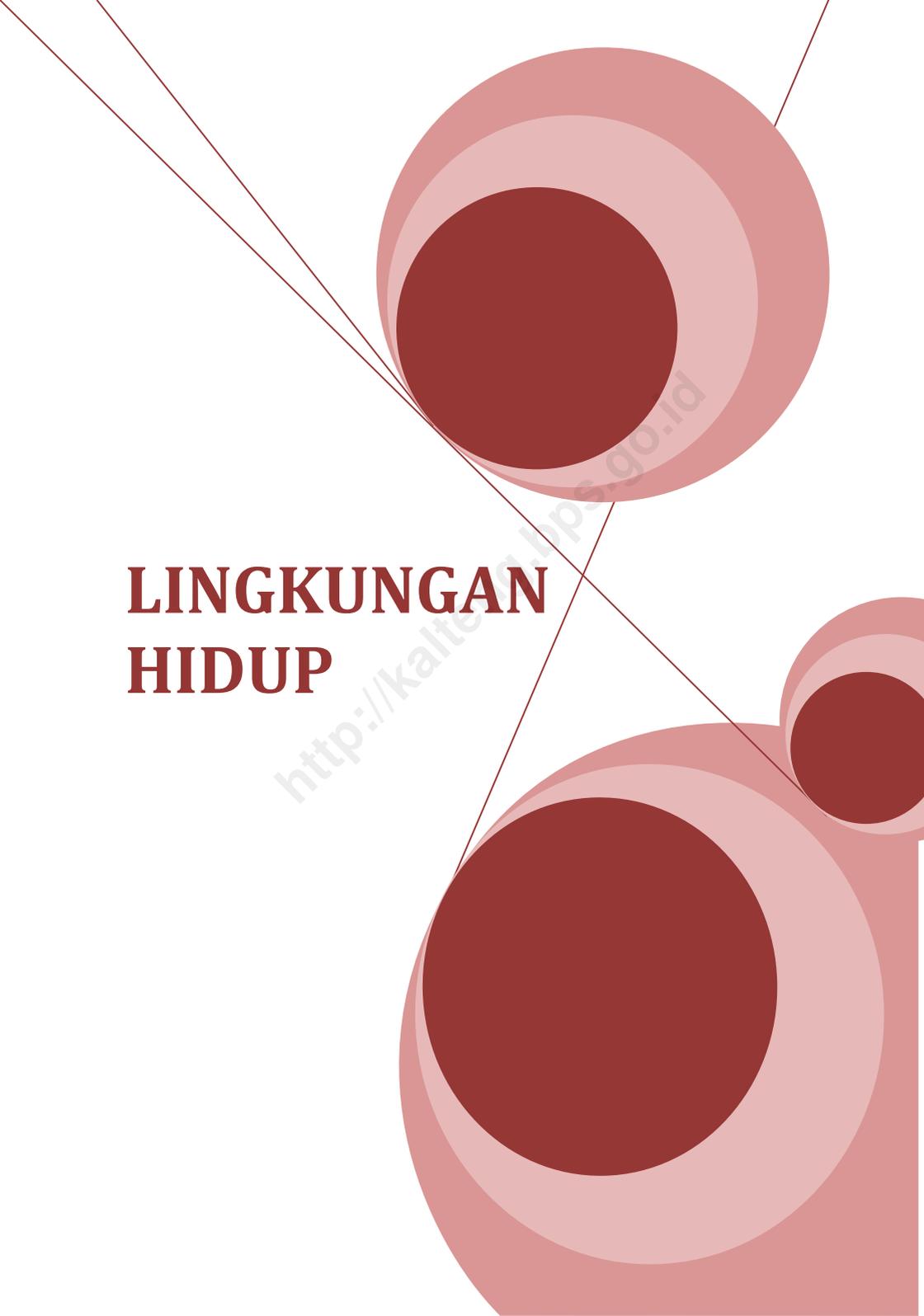
Sementara itu, jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 10.000 penduduk diperkirakan sebanyak 14 orang pada

tahun 2011 kemudian meningkat menjadi 21 orang pada tahun 2012 kemudian turun lagi menjadi 14 orang pada tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 17 orang pada tahun 2014. Kondisi dan perkembangan kriminalitas pada masing-masing Polres di Kalimantan Tengah selama periode tahun 2011-2014 menunjukkan pola yang bervariasi.

Tabel 1.9. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) per 1.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2014

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	1,51	2,50	1,67	2,00
Kotawaringin Timur	0,99	2,06	1,10	1,67
Kapuas	1,04	1,01	0,90	1,42
Barito Selatan	1,28	1,56	1,08	1,59
Barito Utara	1,76	2,17	1,86	1,55
Sukamara	1,29	1,83	1,00	1,17
Lamandau	1,34	1,94	1,88	1,75
Seruyan	0,61	0,73	0,63	0,82
Katingan	0,89	1,51	1,35	2,09
Pulang Pisau	0,80	2,59	0,89	1,56
Gunung Mas	1,15	1,76	1,07	1,12
Barito Timur	2,01	2,79	1,56	2,06
Murung Raya	0,66	0,99	0,71	0,81
Palangka Raya	3,05	4,36	2,17	2,16
Kalimantan Tengah	1,40	2,10	1,36	1,70

Sumber: olah data Polda Kalimantan Tengah



LINGKUNGAN HIDUP

<http://kalteknologiips.go.id>

2. Lingkungan Hidup

2.1. Latar Belakang

Pengembangan kebijakan dan regulasi lingkungan di Indonesia dipicu oleh hasil-hasil konferensi *Human Living Environment*, antara lain Konferensi Stockholm pada tahun 1971 yang diikuti oleh konferensi Nairobi pada tahun 1982. Menyadari bahwa permasalahan lingkungan tidak mengenal batas-batas negara, Indonesia merespon dengan mengacu pada ukuran-ukuran baku terkait dengan permasalahan lingkungan global.

Pembangunan menyebabkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut ada kalanya memberikan keuntungan pada kehidupan sosial ekonomi terhadap kehidupan masyarakat, tetapi dapat pula menimbulkan kerugian. Suatu perubahan yang menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan rakyat akan menambah beban masyarakat sehingga mengurangi manfaat pembangunan terhadap kesejahteraan rakyat. Maka dalam setiap langkah usaha pembangunan sangatlah penting agar mempertanyakan sampai seberapa jauhkah usaha pembangunan ini mendekati pada pencapaian sasaran jangka panjang yakni terbinanya manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan pokok pelaksanaan hubungan antara manusia dengan masyarakat dan lingkungan alam.

Manusia berada di lingkungan hidup binaan yang saling berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan hidup alam. Sementara hubungan manusia dengan sesama manusia membentuk lingkungan hidup sosial. Secara berangsur-angsur manusia mulai mendominasi ekosistem dan membentuk lingkungan hidup sosial serta sekaligus menciptakan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan berkembang sesuai dengan perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ketiga unsur

lingkungan hidup ini perlu berkembang secara serasi dan seimbang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian, keseimbangan, dan keserasian yang dinamis antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan lingkungannya. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan mutu/kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan merehabilitasi kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di daerah perkotaan jauh lebih besar pengaruh dan dampak terhadap lingkungan dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, lingkungan alam sangat sulit dipertahankan kelestarian wujud aslinya sebagai akibat lingkungan buatan manusia. Terjadinya pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan kebisingan suara merupakan wujud nyata dari pengaruh negatif perubahan lingkungan alami oleh kegiatan manusia. Pertambahan penduduk telah menjadi penyebab perubahan daerah pemukiman baru yang akan menyebabkan pula terjadinya perubahan lingkungan sosial budaya. Manusia dengan lingkungan hidup sosialnya maupun keadaan lingkungan hidup secara keseluruhan mempengaruhi kualitas hidup. Untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka pembangunan dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan.

Pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengelola lingkungan hidup membutuhkan informasi mengenai lingkungan hidup. Informasi tersebut memotret kondisi lingkungan pada suatu waktu, baik mengevaluasi tingkat kerusakan yang terjadi, perbaikan yang telah dilakukan, maupun langkah-langkah yang perlu disusun sebagai bahan masukan bagi perencanaan lingkungan di waktu mendatang. Para pembuat kebijakan perlu memasukkan faktor lingkungan dalam semua pertimbangan kegiatannya,

ditunjang informasi tentang lingkungan hidup yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup, perlu dikembangkan indikator yang dapat mengukur kualitas lingkungan hidup. Statistik sebagai alat bantu yang sering dipakai untuk melihat fenomena dan perilaku lingkungan hidup perlu terus-menerus disusun dan dikembangkan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Statistik dalam arti sempit adalah data ringkasan berbentuk angka (kuantitatif). Sedangkan dalam arti luas, statistik berarti suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan penelitian yang tidak menyeluruh. Statistik lingkungan hidup merupakan data hasil pengolahan dan penyajian yang berhubungan dengan keadaan lingkungan hidup. Dari data tersebut akan dilihat kondisi lingkungan hidup pada suatu waktu dan waktu-waktu sebelumnya. Penggunaan statistik lingkungan hidup diantaranya untuk menganalisis keadaan masa datang, sehingga dapat segera dibuat terapi bagi perbaikan lingkungan hidup.

Hingga saat ini data mengenai lingkungan hidup dikumpulkan dan disebarkan oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, institusi riset, dan organisasi internasional. Institusi-institusi tersebut mengumpulkan data melalui kegiatan sensus, survei, pemantauan, dan catatan-catatan administrasi yang ada. Sebagai contoh, data tentang kualitas lingkungan didasarkan pada kebutuhan dan disajikan dalam waktu yang tidak rutin dan ruang terbatas. Misalnya data kualitas air dan analisis debu yang mengambang di udara tersebut melalui lebih dari satu instansi, baik kementerian atau lembaga sehingga memerlukan usaha dan ketelitian memperoleh kecocokan

akurasinya. Data yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi harapan dan belum dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup.

Seperti banyak negara lain, statistik lingkungan di Indonesia dianggap kurang berkembang, terutama dibandingkan dengan statistik demografi, sosial, dan ekonomi. Masalah lingkungan yang sangat luas dan rumit, serta metode dan teknik pengumpulan, penyajian, dan penafsiran statistik membutuhkan ketelitian. Dengan demikian, kerangka kerja statistik lingkungan harus mengalami perbaikan terus menerus. BPS telah mengadopsi dua kerangka kerja dan akan terus memperbaiki kerangka tersebut sehingga akan mendapatkan kerangka yang tepat dan up to date.

Indonesia telah memiliki kerangka kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (*Indonesia Framework for the Development of Environment Statistics/IFDES*) sejak tahun 1999. Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL), BPS mengembangkan kerangka yang mengacu pada prinsip utama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kerangka Kerja PBB untuk Pengembangan Statistik Lingkungan Hidup (*United Nations Framework for the Development of Environment Statistics/UNFDES*). IFDES dibentuk dengan menggabungkan prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan prosedur untuk mengkategorikan informasi berdasarkan UNFDES.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup juga merupakan suatu sistem dengan tiga sub sistem utama yang saling berkaitan, yaitu lingkungan alam

(ekosistem), lingkungan hidup buatan/binaan (tekno sistem), dan lingkungan hidup sosial (sosio sistem).

Lingkungan alam didefinisikan sebagai lingkungan yang belum tersentuh dan tidak diciptakan oleh manusia. Dalam lingkungan alam, manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sarana ekonomi melalui kegiatan pertambangan, pertanian, industri, ekonomi, transportasi, perumahan, dan lainnya. Lingkungan ini dikatakan sebagai lingkungan buatan manusia. Selain itu, manusia secara bertahap mendominasi ekosistem dan membentuk kelompok sosial. Interaksi kelompok sosial dan pembentuk lingkungan sosial ini meliputi keragaman dan nilai-nilai budaya. Dalam IFDES juga diklasifikasikan ke dalam tiga komponen lingkungan tersebut.

Variabel lingkungan untuk masing-masing komponen tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori informasi yang diadaptasi dari kerangka UNFDES. Kategori informasi tersebut mencerminkan tekanan, dampak, dan respon. Masalah lingkungan adalah hasil dari kegiatan manusia dan peristiwa alam (tekanan/pressure). Kegiatan manusia dan peristiwa alam dikatakan memiliki dampak pada lingkungan (dampak/state). Sehingga memicu upaya atau respon individu dan sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak lingkungan tersebut (response). Kategori informasi yang digunakan dalam IFDES juga mencakup ketiga kategori tersebut yaitu tekanan, dampak, dan respon.

Peran statistik lingkungan saat ini sangat penting dalam menggambarkan kondisi lingkungan yang sekarang ini cenderung memburuk. Kehadiran statistik lingkungan dapat mencerminkan kesadaran suatu negara terhadap perlindungan lingkungan hidup. BPS sebagai salah satu lembaga negara peduli akan perlindungan lingkungan hidup dan berusaha mengumpulkan data-data statistik lingkungan. Keragaman sumber data

statistik lingkungan meliputi aspek yang sangat luas sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengumpulannya.

Kegiatan pengumpulan data statistik lingkungan membutuhkan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Hal ini sulit untuk dilakukan karena diperlukan dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh lembaga pemerintahan itu sendiri. Pengumpulan data yang berkelanjutan serta relevan dan penting sangat sulit dilakukan. Kebanyakan lembaga pemerintahan mengumpulkan data berdasarkan kebutuhan mereka. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari sensus atau survei yang dilakukan oleh BPS dan laporan tahunan instansi yang terkait lingkungan hidup secara luas.

2.2. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi lingkungan hidup secara umum mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
5. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
6. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
7. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

11. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan baik langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
12. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Lingkungan alam didefinisikan sebagai lingkungan alam murni yang keberadaannya bukan disebabkan oleh manusia. Lingkungan ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Unit Lingkungan alam adalah alam itu sendiri, sedangkan komponen atau media lingkungan alam mencakup hutan, lahan air, flora fauna, mineral, dan udara.
15. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang terbentuk atas upaya manusia mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya untuk memfasilitasi aktivitasnya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Contoh lingkungan buatan diantaranya adalah pemukiman, pabrik, sarana dan prasarana berupa bangunan, jalan, serta sarana fisik lain yang dibangun oleh manusia untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan sosial budaya, termasuk juga hutan yang telah diubah menjadi hutan produksi.
16. Lingkungan sosial adalah lingkungan non fisik yang merupakan hasil interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat atau komunitasnya, yang muncul dalam berbagai fenomena seperti demografi, kesehatan, nilai-nilai sosial budaya, kelompok sosial, ketenagakerjaan, aktivitas sosial, serta kriminalitas.
17. Tekanan adalah semua aktivitas kegiatan sosial ekonomi dan alam menekan terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial.

18. Dampak aktivitas adalah pengaruh perubahan dari aktivitas yang dilakukan pada lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
19. Respon adalah upaya yang dilakukan mencakup beberapa komponen yang berkaitan dengan upaya penyelamatan, penjagaan, maupun rehabilitasi pada lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.
22. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hutan konservasi terdiri dari:
 - a) Kawasan suaka alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM);
 - b) Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA);
 - c) Taman Buru (TB).

23. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
24. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi.
25. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
26. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
27. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
28. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
29. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan epidemi.

30. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik.
31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
32. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
33. Mobil truk adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, selain mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan bermotor roda dua.
34. Perikanan budidaya adalah kegiatan ekonomi dalam bidang budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Untuk keperluan statistik, perikanan budidaya diklasifikasikan atas; budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, dan budidaya di sawah.
35. Perahu/kapal tanpa motor adalah perahu yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung.
36. Perahu/kapal motor tempel adalah perahu/jukung yang menggunakan tenaga penggerak tempel, baik yang dipasang pada sebelah luar buritan maupun bagian sisi atas lambung perahu atau jukung.
37. Perahu/kapal motor adalah perahu/ kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang secara permanen di dalam kapal.

38. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
39. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
40. Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

2.3. Lingkungan Alam

Lingkungan alam didefinisikan sebagai lingkungan hidup yang tidak didominasi oleh manusia dan tidak dibuat oleh manusia. Pada lingkungan alam, manusia memanfaatkan secara alami sumber daya yang terdapat di alam. Kekhawatiran kemerosotan mengenai kualitas lingkungan di Indonesia didasarkan atas kondisi kurang meluasnya pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup sehingga partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan juga rendah. Hal ini diperparah oleh pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang belum memperhatikan implikasi lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Indonesia antara lain menurunnya mutu dan luas hutan, bertambahnya areal kritis yang tidak produktif, erosi, pendangkalan sungai yang mengakibatkan banjir, kualitas, dan volume air permukaan dan air tanah yang menurun, pencemaran laut, jenis binatang dan tumbuhan yang berkurang, serta lingkungan pemukiman yang kian padat dan tidak sehat.

2.3.1. Iklim dan Kualitas Udara

Keseimbangan sistem energi radiasi bumi atmosfer terganggu oleh pelepasan gas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah merubah keseimbangan radiasi energi yang mengakibatkan perubahan suhu dan iklim.

Berdasarkan data iklim dari stasiun pengamatan BMKG di Stasiun Tjilik Riwut suhu udara maksimum tertinggi pada tahun 2014 tercatat dengan suhu rata-rata 35,6°C, sedangkan suhu udara minimum tercatat dengan suhu rata-rata 19,3°C, suhu udara rata-rata terus mengalami peningkatan selama 2011-2014, yaitu dari 27,2°C pada tahun 2011 meningkat menjadi 27,3°C pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 27,4°C pada tahun 2013 dan 2014. Kelembaban udara meningkat dari 83,9 persen pada tahun 2011 menjadi 84,3 persen pada tahun 2012, kemudian meningkat lagi menjadi 84,6 persen pada tahun 2013 dan turun lagi menjadi 83,0 persen pada tahun 2014. Kecepatan angin rata-rata 2,1 meter per detik pada tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 1,5 meter per detik. Curah hujan mencapai 2.853,9 milimeter dengan jumlah hari hujan sebanyak 175 hari menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.259,5 milimeter dengan jumlah hari hujan 241 hari. Selama periode 2011-2014 tekanan atmosfer tidak terlalu berbeda yang berkisar 1.013 milibar. Penyinaran matahari mengalami penurunan dari 57,2 persen pada tahun 2013 menjadi 54,4 persen pada tahun 2014.

Tabel 2.1. Keadaan Iklim Stasiun Tjilik Riwut Palangka Raya, 2011-2014

Keadaan Iklim		Tahun			
		2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Suhu Udara (°C):	Minimum	24,2	23,3	23,7	19,3
	Maksimum	32,4	32,4	32,6	35,6
	Rata-rata	27,2	27,3	27,4	27,4
Kelembaban (%)		83,9	84,3	84,6	83,0
Kecepatan Angin (m/det)		2,5	3,0	1,5	2,1
Jumlah Curah Hujan (mm)		3 434,6	2 596,4	3 259,5	2 853,9
Jumlah Hari Hujan (hari)		218	210	241	175
Tekanan Atmosfer (mb)		1 012,2	1 012,7	1 012,5	1 013,4
Penyinaran Matahari (%)		54,9	51,0	57,2	54,4

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi

Selain mengamati iklim, stasiun pengamatan BMKG juga melakukan pengukuran kualitas air hujan. Air hujan diukur untuk mengetahui konsentrasi unsur-unsur kimia yang terlarut dalam air hujan. Dengan demikian pengukuran ini dapat digunakan untuk menganalisa kadar polutan baik gas maupun debu pada atmosfer yang turun bersama air hujan. Air hujan yang bersifat asam dapat merusak bangunan/gedung karena bersifat korosif terhadap bahan bangunan, selain itu dapat merusak kehidupan biota di danau atau aliran sungai. Hasil analisis air hujan di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya sebagaimana terlihat dalam tabel 2.2. Atmosfer berisi beragam jenis gas. Gas-gas dengan konsentrasi yang tinggi akan menjadi racun bagi manusia dan hewan serta merusak tanaman. Gas-gas yang termasuk kelompok ini antara lain ozon (O₃), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), karbon monoksida (CO), dan kelompok VOC (Volatile Organic

Compound). Jenis gas yang terakhir dapat memicu kanker (misalnya benzena dan butadiena). Gas-gas tersebut di atas berpotensi menjadi racun dan disebut sebagai polutan/pengotor udara. Selain gas atmosfer juga berisi beragam partikel terlarut baik padat maupun cair.

Tabel 2.2. Analisis Air Hujan di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwut Palangka Raya, 2011-2013

Unsur Kimia		Tahun		
		2011	2012	2013
(1)		(2)	(3)	(4)
Derajat Keasaman (pH)	Maksimum	5,81	6,60	5,79
	Minimum	5,14	4,82	4,80
Daya Hantar (mho/cm)	Maksimum	25,10	80,20	27,50
	Minimum	3,70	3,60	3,10
Kalsium (mg/l)	Maksimum	4,15	5,43	1,06
	Minimum	0,21	0,19	0,19
Magnesium (mg/l)	Maksimum	0,05	0,90	0,24
	Minimum	0,00	0,02	0,01
Natrium (mg/l)	Maksimum	0,33	4,71	1,08
	Minimum	0,06	0,08	0,04
Kalium (mg/l)	Maksimum	0,42	1,20	0,39
	Minimum	0,06	0,05	0,03
Amonium (mg/l)	Maksimum	0,25	2,35	0,51
	Minimum	0,03	0,00	0,01
Klorida (mg/l)	Maksimum	2,36	13,59	2,56
	Minimum	0,25	0,12	0,13
Sulphat (mg/l)	Maksimum	3,16	9,32	3,34
	Minimum	0,79	0,17	0,06
Nitrat (mg/l)	Maksimum	2,30	6,08	1,93
	Minimum	0,26	0,00	0,01
Kesadahan Total (mg/l)	Maksimum	4,36	6,29	1,30
	Minimum	0,24	0,21	0,21
Keasaman (meg/l)	Maksimum	49,51	100,80	27,87
	Minimum	7,31	0,00	4,74

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Polutan di atmosfer berasal dari transformasi energi, konsumsi energi, dan proses industri yang juga merupakan kontributor utama polusi udara. Polusi udara merusak kesehatan manusia, ekosistem, bangunan, dan monumen. Menurunnya kualitas udara dapat berakibat besar pada berbagai bidang kehidupan manusia yang pada dasarnya akan menurunkan kualitas hidup. Polusi udara biasanya digambarkan sebagai partikel terlarut (debu, uap, kabut, asap) dan gas pencemar (gas, penguapan, dan bau busuk). Udara tercemar apabila nilai rata-rata bulanan konsentrasi partikel terlarut di udara melampaui baku mutu $230 \mu\text{gr}/\text{m}^3/24 \text{ jam}$. Rata-rata bulanan konsentrasi partikel terlarut di udara yang diukur di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwit sebagaimana terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Rata-rata Bulanan Konsentrasi Partikel Terlarut di Udara Menurut Bulan di Stasiun Pengamatan Tjilik Riwit Palangka Raya, 2011-2013 ($\mu\text{gr}/\text{m}^3/24 \text{ jam}$)

Bulan	Tahun		
	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	-	7,43	13,64
Februari	11,84	15,64	11,14
Maret	16,34	8,13	13,54
April	22,34	-	6,83
Mei	11,34	12,84	16,34
Juni	-	24,74	17,04
Juli	91,74	17,04	12,24
Agustus	117,15	48,64	23,44
September	62,14	-	56,74
Oktober	72,04	-	166,55
November	15,54	-	49,14
Desember	7,73	16,94	-

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Suspended Particulate Matter (SPM) merupakan partikel terlarut di udara termasuk didalamnya total partikel terlarut atau Total Suspended Partikel (TSP), PM_{10} (SPM dengan median aerodinamisnya berdiameter kurang dari 10 μm), $PM_{2,5}$ (SPM dengan median aerodinamisnya berdiameter kurang dari 2,5 μm). Partikel terlarut dapat memicu penyakit pernafasan dan kanker, korosi pada logam, menghancurkan tanaman, dan lain-lain. Kualitas udara perlu dimonitoring untuk membantu melindungi masyarakat dari polusi udara, sehingga diperoleh acuan untuk melindungi kesehatan dari dampak buruk polusi udara dan untuk menghilangkan atau mengurangi pencemar udara yang membahayakan udara yang membahayakan manusia.

Polusi udara di kota-kota besar Indonesia biasanya berasal dari sumber bergerak (alat transportasi), sumber tidak bergerak, dan kebakaran hutan. Regulasi terkait pengontrolan polusi udara masih lemah jika dibandingkan dengan kontrol polusi air. Untuk meningkatkan kualitas udara dan mencegah polusi udara, pemerintah telah membatasi polusi udara dari tingkat paling awal, memperbaiki prosedur ijin terkait konsensi hutan yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan, mengawasi, dan melaksanakan standar kualitas udara, serta melaksanakan penghematan energi. Penegakan hukum juga menjadi prioritas utama di era supremasi hukum ini.

2.3.2. Sumber Daya Hutan

Hutan merupakan ekosistem yang kaya dan paling luas penyebarannya di bumi. Hutan memiliki beberapa fungsi yang penting yaitu sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya; fungsi rekreasional dan fungsi ekologi, antara lain mempertahankan kesuburan tanah, menyimpan dan mengatur tata air tanah dan sirkulasi udara; mempertahankan keanekaragaman hayati; serta berperan sebagai penyerap karbon.

Dampak aktivitas manusia terhadap keberadaan serta regenerasinya pada hutan alami memicu keprihatinan yang luas dari berbagai pihak. Sumber daya hutan terancam oleh eksploitasi hutan yang berlebihan, penurunan kualitas lingkungan serta alih fungsi lahan hutan. Bentuk tekanan aktivitas manusia terhadap hutan antara lain: perluasan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur transportasi, pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, polusi udara serta pembakaran hutan dengan sengaja.

Menghambat penggundulan hutan untuk melestarikan lahan, air, udara, dan menjadi pertimbangan dalam Agenda 21 yang diprakarsai oleh *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992. Agenda 21 menjadi dasar bagi kerja sama internasional dalam pengelolaan, konservasi dan pembangunan yang berkesinambungan dari seluruh jenis hutan. Resolusi Rio juga memberikan dasar bagi proses modifikasi kebijakan nasional yang dirancang untuk menstimulasi pembangunan yang berkesinambungan dan sesuai untuk lingkungan, baik di negara-negara industri maupun yang sedang berkembang.



Penutupan lahan/vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. Gambar 2.1. menyajikan keadaan penutupan lahan/vegetasi dalam kawasan hutan yang

diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+. Berdasarkan data tersebut, total luas penutupan lahan kawasan hutan di Kalimantan Tengah ditafsir 7.674,0 ribu hektar pada tahun 2011-2012, mengalami penurunan dibandingkan periode 2009-2010 yang mencapai 8.038,2 ribu hektar.

Salah satu jenis hutan adalah hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada zona peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang memiliki nilai penting untuk perlindungan pantai, penahanan endapan lumpur, dan fungsi keseimbangan lingkungan. Pada tabel 2.4 terlihat bahwa kondisi hutan mangrove yang rusak mencapai 16,38 persen (6.969,00 hektar).

Tabel 2.4. Luas dan Kondisi Hutan Mangrove Kalimantan Tengah, 2014

Hutan Mangrove		Luas (Ha)	Persentase
(1)		(2)	(3)
Luas		42 537,00	100,00
Kondisi:	Baik	34 067,00	80,09
	Sedang	1 501,00	3,53
	Rusak	6 969,00	16,38

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan refensi karbon. Luas lahan kritis menurut tingkat kekritisannya sampai dengan tahun 2012 seluas 4,64 juta hektar (Tabel 2.5), dengan perincian lahan sangat kritis 1,14 juta hektar dan lahan kritis 3,5 juta hektar. Luas lahan kritis ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2007.

Tabel 2.5. Luas Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisannya, 2007-2012 (Ha)

Tingkat Kekritisan	2007	2012
(1)	(2)	(3)
Kritis	1 939 144	3 498 036
Sangat Kritis	1 267 743	1 138 854
Jumlah	3 206 887	4 636 890

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia, Kementerian Kehutanan

Hutan di Indonesia dahulu sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia. Sayangnya, akhir-akhir ini kebakaran hutan di Indonesia khususnya Kalimantan Tengah semakin sering terjadi. Penyebabnya bisa beragam yang dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu alam dan campur tangan manusia. Pada dasarnya, peristiwa ini memberi dampak negatif maupun positif. Namun, jika dicermati, dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi ketimbang dampak positifnya. Oleh sebab itu hal ini penting untuk dicegah agar dampak negatifnya tidak merugikan manusia terlalu banyak. Salah satu upaya pencegahan yang paling mendasar adalah dengan memahami penyebab terjadinya kebakaran hutan.



Salah satu faktor alam yang dapat berdampak pada hutan adalah kondisi ekstrim panas yang dapat menimbulkan titik panas. Kebakaran hutan dapat diakibatkan dari titik panas. Potensi kebakaran hutan dapat dideteksi salah satunya dari jumlah dan sebaran titik api yang dipantau dari citra satelit NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Jumlah sebaran titik panas yang terdeteksi oleh satelit NOAA selama tahun 2008-2012 disajikan pada Gambar 2.2. Sementara itu, faktor manusia yang mengancam ekosistem hutan adalah aktivitas perambahan hutan, perladangan berpindah, dan penebangan liar.

2.3.3. Sumber Daya Air

Air bersih merupakan kebutuhan utama manusia dan lingkungan. Efisiensi penggunaan air merupakan kunci untuk menyesuaikan kebutuhan dan persediaan air. Tekanan pada sumber daya air dipicu oleh pemakaian berlebih dan kualitas lingkungan yang semakin menurun. Dampak buruk penggunaan air secara tidak efisien antara lain pendangkalan sungai, kelangkaan air, salinasi air di daerah pantai, masalah kesehatan masyarakat, hilangnya hutan bakau, penggundulan hutan, dan menurunnya produksi pangan.

Kegiatan industri, pertanian, dan limbah domestik merupakan penyebab utama polusi air. Beban polusi air banyak terjadi di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat industrialisasi dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Polusi air yang serius terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.

Komitmen untuk mencegah dan mengontrol polusi air lebih kuat sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 terkait tentang Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut air dibagi menjadi empat kategori, yaitu Kelas A (dapat diminum langsung), kelas

B (berfungsi sebagai air baku air minum). Kelas C (untuk keperluan peternakan dan pertanian), kelas D (untuk keperluan pertanian, industri, dan pembangkit listrik tenaga air). Dengan demikian, kualitas air sungai harus dijaga dan ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Manajemen air dan kontrol pencemaran air sebaiknya dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral, dengan mempertimbangkan sisi ekonomi, ekologi, dan sosial.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat berubahnya fungsi lingkungan sumber daya air antara lain: banjir, erosi, dan sedimentasi, tanah longsor, banjir lahar dingin, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air, terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa, wabah penyakit, intrusi dan/atau perembesan. Oleh sebab itu data mengenai danau dan waduk sebagai sarana penyimpan air dan data karakteristik sungai, terutama sungai-sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai, menjadi sangat penting. Daerah Pengaliran Sungai (DPS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Luas danau Sembuluh di Kalimantan Tengah menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan kondisi tahun 2012 adalah seluas 7.800 hektar.

Informasi lain yang dapat menggambarkan sumber daya air adalah informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis di sekitar DPS. Informasi kondisi hidrologis misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air. Informasi kondisi hidrometeorologis misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara. Informasi kondisi hidrogeologis mencakup cekungan air tanah misalnya potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air.

Informasi yang dapat disajikan mengenai kondisi hidrologis DPS diantaranya debit sungai dan tinggi aliran sungai. Data debit sungai yang

diukur adalah data debit harian. Induk Sungai Barito yang terletak di Kabupaten Kapuas, merupakan DPS terluas di Kalimantan Tengah yaitu sebesar 30.536 kilometer persegi. Sedangkan debit sungai harian maksimum terjadi di Induk Sungai Barito Desa Pujon dengan debit harian sebesar 5.276 meter kubik per detik.

Tabel 2.6. Luas Daerah Pengaliran dan Debit di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 1.000 km², 2010

Induk Sungai	Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas DPS (km ²)	Debit (m ³ /det)	
					Maks	Min
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Barito	Kapuas	Kapuas Tengah	Pujon	30 536	5 276,00	138,50
Barito	Barito Timur	Dusun Tengah	Ampah	1 531	128,00	8,40
Kapuas	Kapuas	Kapuas Tengah	Pujon	4 741	1 270,00	108,10
Kahayan	Palangka Raya	Jekan Raya	Palangka	14 175	2 716,00	26,30
Kahayan	Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	5 591	1 471,00	209,00
Katingan	Katingan	Katingan Hilir	Kasongan	11 929	1 615,00	521,30
Lamandau	Kotawaringin Barat	Arut Utara	Pangkut	1 968	289,00	84,70
Lamandau	Lamandau	Bulik	Nanga Bulik	7 082	1 529,00	309,70

Sumber: Data Tahunan Debit Sungai 2010, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

Informasi tentang tinggi aliran sungai yang terbesar terjadi di Induk Sungai Kapuas sebesar 4.482,30 milimeter. Rata-rata besarnya aliran terbesar di Induk Sungai Barito Desa Pujon yang mencapai 2.068 meter kubik per detik. Sedangkan volume air terbesar di Induk Sungai Lamandau Kelurahan Nanga Bulik yang mencapai 21.422,5 juta meter kubik.

Tabel 2.7. Rata-rata Harian Aliran Sungai, Tinggi Aliran, dan Volume Air di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 1.000 km², 2010

Induk Sungai	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Rata-rata Besarnya Aliran (m ³ /det)	Rata-rata Aliran (m/det/km ²)	Tinggi Aliran (mm)	Volume Air (10 ⁶ m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Barito	Kapuas	Kapuas Tengah	Pujon	2 068,00	67,70	2 136,00	6.523,0
Barito	Barito Timur	Dusun Tengah	Ampah	28,70	18,70	392,20	601,6
Kapuas	Kapuas	Kapuas Tengah	Pujon	721,30	152,10	4 482,30	21.250,7
Kahayan	Palangka Raya	Jekan Raya	Palangka	1 770,00	124,00	3 937,00	5.581,0
Kahayan	Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	638,00	114,00	3 603,00	2.014,0
Katingan	Katingan	Katingan Hilir	Kasongan	1 105,00	92,70	2 923,00	3.487,0
Lamandau	Kotawaringin Barat	Arut Utara	Pangkut	180,00	91,70	2 892,00	5.691,0
Lamandau	Lamandau	Bulik	Nanga Bulik	908,20	128,20	3 024,90	21.422,5

Sumber: Data Tahunan Debit Sungai 2010, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

2.3.4. Sumber Daya Ikan

Perikanan berperan dalam rantai makanan dan ekosistem perairan. Pembangunan daerah pesisir dan peningkatan kualitas lingkungan memberi tekanan terhadap cadangan ikan. Eksploitasi berlebih berakibat pada cadangan ikan air tawar maupun ikan laut. Budidaya perikanan telah berkembang dengan sangat pesat sehingga ketergantungan terhadap produk pakan menjadikan kompetisi dengan pasar komersil dan dapat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan budidaya perikanan.

Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan menjadi perhatian utama. Dengan meningkatnya volume tangkapan ikan, isu sentral manajemen area penangkapan ikan berkelanjutan adalah apakah abstraksi sumber daya melampaui kemampuan persediaan untuk memperbaharui diri menurut rentang waktu tertentu. Selama periode 2011-2012 terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap baik di perairan umum maupun perairan laut, meskipun telah terjadi penurunan pada tahun 2011.

Tabel 2.8. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Perairan (Ton), 2009-2012

Jenis Perairan	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	38 545	40 157	35 174	40 381
Laut	47 359	52 123	46 400	54 574

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan dan hambatan untuk memproduksi secara maksimal. Beberapa tantangan yang muncul ditengah potensi perikanan yang dimiliki Indonesia seperti adanya *illegal fishing*, kurangnya dukungan sarana dan prasarana perikanan, rendahnya mutu hasil perikanan, kerusakan lingkungan ekosistem laut, dan lemahnya *market intelligence*. *Illegal fishing* merupakan masalah rutin yang dihadapi bangsa Indonesia setiap tahun, dimana sumber daya ikan Indonesia dicuri nelayan negara lain. Mereka dengan sengaja mencari ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan peralatan yang lengkap dan kapal yang besar. Luasnya perairan dan tingkat pengamanan yang lemah dari pemerintah Indonesia menjadikan jalan masuk terjadinya *illegal fishing*.

Pengamanan yang lemah ini dikarenakan armada yang dimiliki Indonesia dalam menjaga keamanan perairan sangat minim. Selain itu rendahnya jangkauan nelayan di perairan lepas menjadikan sumberdaya yang dimiliki Indonesia tidak bisa termanfaatkan secara maksimal. Masuknya kapal-kapal penangkap ikan asing secara illegal sangat merugikan nelayan, bahkan mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. *Illegal fishing* dan *destructive fishing* harus dipandang sebagai *extraordinary crime* karena secara nyata telah menyebabkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan. Praktek tersebut menyebabkan kerugian sangat besar di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Selain masalah di atas, di beberapa wilayah perairan Indonesia telah terjadi gejala tangkap lebih (*overfishing*). Beberapa perairan di Indonesia yang tengah berada pada lampu merah atau *overfishing* seperti Laut Jawa, Samudera Hindia, Laut Sumatera, dan Selat Malaka. Kondisi *overfishing* tidak hanya disebabkan karena tingkat penangkapan yang melebihi potensi lestari sumber daya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan akibat pencemaran.

2.3.5. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai keanekaragaman dan variabilitas diantara makhluk hidup, termasuk keanekaragaman ekosistem pada tingkat spesies dan keanekaragaman genetik pada spesies. Konservasi keanekaragaman hayati sudah menjadi perhatian nasional dan global. Tekanan pada keanekaragaman hayati dapat berupa tekanan fisik (contoh: perubahan habitat dan fregmentasi akibat perubahan tata guna lahan dan konversi permukaan tanah), tekanan kimiawi (polusi akibat aktivitas manusia) atau tekanan biologi (perubahan dinamika penduduk dan struktur spesies

melalui pelepasan spesies tertentu atau penggunaan secara komersil sumber daya hutan).

Konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan merupakan kesatuan utuh pembangunan berkelanjutan yang memadukan proses integrasi kepentingan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan ekonomi dan juga sebagai alat ukur untuk melindungi wilayah, habitat, dan spesies.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem diterbitkan untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sudah menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan (contoh hutan konservasi) dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan yang bertujuan untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah, dapat berfungsi dan siap untuk dimanfaatkan.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan sasaran utama yang bisa diukur melalui dua parameter yaitu baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dua parameter ini menjadi indikator apakah rencana usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan hidup menghadapi beberapa hambatan utama antara lain sikap mental dan tradisi yang beranggapan bahwa alam memang

disediakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia sehingga menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan. Hambatan lain adalah pembiayaan pemulihan lingkungan yang sudah terlanjur rusak memerlukan biaya yang sangat besar.

Konservasi flora dan fauna harus dilakukan agar kekayaan alam yang ada dapat terlindungi dan berguna bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya di masa yang akan datang. Untuk melindungi flora dan fauna dari kerusakan maupun kepunahan, dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain pembentukan cagar alam, suaka margasatwa, taman laut, dan taman nasional.

Tabel 2.9. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Menurut Jenis Konservasi, 2010-2011

Jenis Konservasi	Jumlah (unit)		Luas (Ha)	
	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konservasi Daratan				
❖ Cagar Alam	3	3	246 916	246 916
❖ Suaka Margasatwa	1	1	76 110	76 110
❖ Taman Wisata Alam	2	2	2 533	2 533
❖ Taman Nasional	3	3	1 094 330	1 094 330
Konservasi Laut				
❖ Cagar Alam	-	-	-	-
❖ Suaka Margasatwa	-	-	-	-
❖ Taman Wisata Alam	-	-	-	-
❖ Taman Nasional	-	-	-	-

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2011, Kementerian Kehutanan

Jumlah dan luas kawasan konservasi baik cagar alam, suaka margasatwa, dan taman wisata alam dari tahun 2010 hingga 2011 relatif tidak berubah. Cagar alam berjumlah tiga unit dengan luas 246.916 hektar, suaka margasatwa berjumlah satu unit dengan luas 76.110 hektar, taman wisata alam berjumlah dua unit dengan luas 2.533 hektar, taman nasional berjumlah tiga unit dengan luas 1.094.330 hektar.

2.3.6. Bencana Alam

Bencana alam merupakan salah satu bentuk dari kerawanan ekosistem. Kemunduran (degradasi) ekosistem adalah menurunnya fungsi ekosistem yang disebabkan oleh kerawanan. Degradasi ini dapat dilihat dari menurunnya kuantitas fungsi ekosistem yang dapat disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia. Degradasi ekosistem oleh peristiwa alam meliputi kebakaran, pemangsaan, badai topan, letusan gunung berapi, banjir, longsor, kekeringan, dan wabah penyakit tanaman. Bentuk aktivitas manusia yang menyebabkan degradasi antara lain aktivitas kehutanan, pertanian, perumputan, pertambangan, pengembangan sumber daya air, konstruksi jalan raya, dan urbanisasi.

Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Bencana alam biasanya tidak dapat dielakkan, selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi serta kerusakan infrastruktur fisik. Kejutan tersebut terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Ketersediaan informasi tentang wilayah rawan bencana penting agar penanganan wilayah bencana baik rehabilitasi infrastruktur maupun penanganan tanggap darurat terhadap korban bencana dapat terantisipasi dengan baik. Untuk mengantisipasi jumlah korban baik jiwa dan materi,

diperlukan data dan informasi bencana alam secara berkesinambungan. Data tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Tabel 2.10 menyajikan data frekuensi gempa berdasarkan kedalaman dan kekuatan menurut pulau selama tahun 2013. Gempa dengan kedalaman kategori dangkal banyak terjadi di Pulau Sulawesi dan Maluku yaitu sebanyak 518 kali. Sedangkan gempa dengan kedalaman kategori menengah banyak terjadi di Pulau Maluku sebanyak 318 kali dan gempa dengan kedalaman kategori dalam juga banyak terjadi di Pulau Maluku sebanyak 34 kali. Kekuatan gempa dalam kategori kecil terjadi sebanyak 2.256 kali dan paling banyak terjadi di Pulau Maluku. Kekuatan gempa dalam kategori sedang terjadi sebanyak 1.534 kali, sedangkan gempa dalam kategori kekuatan besar terjadi sebanyak 121 kali.

Tabel 2.10. Frekuensi Gempa Berdasarkan Kedalaman dan Kekuatan Menurut Pulau, 2013

Pulau	Kedalaman (km)			Kekuatan (SR)		
	Dangkal (<60)	Menengah (60-300)	Dalam (>300)	Kecil (<4,0)	Menengah (4,0-5,0)	Besar (>5,0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	622	117	1	446	258	36
Jawa	414	74	3	320	157	14
Bali	77	21	1	75	21	3
Nusa Tenggara	469	190	9	485	171	12
Kalimantan	-	1	-	-	1	-
Sulawesi	518	251	21	508	273	9
Maluku	518	318	34	322	518	30
Papua	216	36	-	100	135	17
Indonesia	2 834	1 008	69	2 256	1 534	121

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Ketersediaan data yang tepat dan akurat tentang wilayah rawan bencana berguna untuk meningkatkan kewaspadaan sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi dini kepada masyarakat Indonesia adalah memetakan daerah yang potensial mengalami bencana. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa informasi nilai Indeks Risiko Bencana. Indeks risiko bencana dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu bencana. Kelas risiko dalam indeks risiko bencana dibagi menjadi 3 berdasarkan skor risiko bencana, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Indeks Risiko Bencana tahun 2013 sebesar 141 (tingkat risiko sedang). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah bencana alam yang terjadi di Kalimantan Tengah sebagaimana terlihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11. Jumlah Bencana Alam Menurut Jenisnya, 2012-2013

Jenis Bencana Alam	Tahun	
	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Banjir	8	12
Banjir dan tanah longsor	-	-
Gelombang pasang/abrasi	-	-
Gempa bumi	-	-
Gempa bumi dan tsunami	-	-
Kebakaran hutan dan lahan	-	4
Kekeringan	-	2
Letusan gunung api	-	-
Puting beliung	-	2
Tanah longsor	-	-
Tsunami	-	-

Sumber: Data dikutip dari <http://dibi.bnpb.go.id>, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2.4. Lingkungan Buatan

Pembangunan merupakan aktivitas manusia dalam merubah lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan buatan terbentuk atas upaya manusia dalam memanfaatkan keadaan sekitar agar mempermudah kehidupannya. Dengan demikian lingkungan buatan merupakan hasil dari pembangunan itu sendiri. Contoh lingkungan buatan antara lain sarana dan prasarana berupa bangunan dan perumahan, jalan, dan sarana fisik lainnya yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Kehidupan manusia berkaitan erat dengan lingkungan hidup dan didalam proses kehidupan ini terjadi inetraksi yang berlangsung terus menerus. Manusia melakukan interaksi dengan makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Di samping itu manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup buatan yang merupakan hasil buaatannya seperti rumah, jalan, jembatan, waduk, dan sebagainya.

2.4.1. Perikanan

Sektor perikanan berperan penting dalam ketahanan pangan nasional, karena hasil perikanan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Sumber daya perikanan laut di wilayah barat Indonesia dieksploitasi dengan intensif, sedangkan wilayah Indonesia timur masih dapat dikembangkan lagi. Beragamnya jenis ikan dan organisme perairan laut memberikan kesempatan beragam jenis aktivitas perikanan tangkap.

Pengembangan perikanan dilakukan dengan memperbaiki produktivitas dan efisiensi, sehingga akan meningkatkan produksi perikanan. Peningkatan produksi ikan diharapkan meningkatkan pendapatan nelayan dan petambak, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis, mendorong tumbuhnya industri domestik, serta menopang pertumbuhan regional. Usaha

pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya perikanan dan lingkungan sehingga mencapai pembangunan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Isu dan permasalahan utama terkait perikanan tangkap dan budidaya antara lain: penangkapan ikan secara berlebihan baik perikanan laut maupun perikanan darat; nelayan dengan standar hidup yang rendah; ketiadaan dukungan keuangan dalam bentuk kredit; ketiadaan manajemen perikanan, khususnya monitoring, pengawasan, dan penindakan; rusaknya terumbu karang dan lingkungan laut yang mempengaruhi sektor perikanan.

Budidaya perikanan dapat dilakukan di perairan umum dan laut. Budidaya yang dilakukan di perairan umum yang dibahas dalam sub bab ini adalah budidaya perikanan di kolam dan tambak. Data dan informasi mengenai kegiatan yang menunjang budidaya perikanan di kolam dan tambak yaitu penggunaan pupuk dan pestisida untuk penyiapan lahan budidaya perikanan. Pada Tabel 2.12 terlihat bahwa jumlah pupuk organik yang digunakan di kolam lebih banyak daripada pupuk anorganik. Baik pupuk maupun obat yang digunakan meningkat tajam dibandingkan tahun 2008.

Tabel 2.12. Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Digunakan di Kolam dan Tambak Menurut Jenis Pupuk dan Obat (Kg), 2008-2009

Jenis Pupuk/Obat	Kolam		Tambak	
	2008	2009	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Pupuk				
➤ Organik	1 103	1 411 690	-	-
➤ Anorganik	217	452 890	-	-
Jenis Obat				
➤ Pestisida	424	548	-	-
➤ Kapur	-	-	-	-

Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2008-2009, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jumlah perahu/kapal penangkap ikan di perairan laut menurut jenis perahu/kapal disajikan pada Tabel 2.13. Perahu/kapal penangkap ikan tanpa motor sebanyak 1.217 menurun dibandingkan tahun 2008. Perahu/kapal penangkap ikan dengan motor tempel sebanyak 733 mengalami peningkatan dibanding 2008, sedangkan perahu/kapal penangkap ikan dengan kapal motor sebanyak 4.066 yang mengalami penurunan dibanding 2008.

Tabel 2.13. Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Laut Menurut Jenis Perahu/Kapal (Unit), 2008-2009

Jenis Perahu/Kapal	Tahun	
	2008	2009
(1)	(2)	(3)
Tanpa Motor	2 249	1 217
Motor Tempel	588	733
Kapal Motor	4 859	4 066

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2008-2009, Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.4.2. Kehutanan

Indonesia adalah negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Pengelolaan kehutanan di Indonesia mengacu pada tiga prinsip dasar, yaitu kesejahteraan sosial, keuntungan ekonomi, dan keberlanjutan lintas generasi. Hutan dibagi menjadi empat kategori, antara lain hutan alam, hutan produksi, hutan lindung, dan hutan wisata. Masalah serius terkait bidang kehutanan adalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh pengelolaan yang salah oleh orang pemegang hak konsensi hutan. Industrialisasi di bidang kehutanan ternyata juga telah mengabaikan hak penduduk asli dan mereka bahkan hampir tergusur dari tanah leluhurnya. Semangat melindungi lingkungan lebih dominan dibandingkan menghormati

hak penduduk asli. Oleh karena itu, kontrol masyarakat diperlukan untuk melindungi kualitas hutan sekaligus melindungi hak-hak penduduk asli dari pembangunan dan industrialisasi bidang kehutanan. Regulasi yang tumpang tindih di sektor kehutanan perlu dibenahi dan penegakan hukum terkait dengan pemberian hak konsensi hutan, supervisi, dan penerapan sanksi yang tegas bagi yang tertangkap melakukan pembakaran harus menjadi prioritas.

Produksi kayu gergajian selama tahun 2009 hingga 2012 disajikan pada tabel 2,14, produksi kayu gergajian mengalami penurunan dari 13.502,62 meter kubik menjadi 10.684 meter kubik pada tahun 2012. Sedangkan produksi kayu lapis mengalami peningkatan dari 190.533 meter kubik menjadi 185.702 meter kubik.

Tabel 2.14. Produksi Kayu Menurut Jenisnya (m³/cum), 2009-2012

Jenis Kayu	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kayu Gergajian	13 502,62	14 927,00	5 912,00	10 684,00
Kayu Lapis	190 533,00	183 032,00	337 609,00	185 702,00

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2012, Kementerian Kehutanan

Kalpataru merupakan penghargaan pada tingkat nasional di bidang lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporannya dan telah berjuang demi pelestarian lingkungan hidup. Kalpataru diserahkan oleh Kepala Negara Republik Indonesia setiap tahun sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2013 selama tahun 1980 hingga tahun 2013 di Kalimantan Tengah hanya dua kali menerima kalpataru, yaitu kategori Pengabdian Lingkungan dan Pembina Lingkungan.

Kegiatan reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis terutama di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Kegiatan reboisasi selama tahun 2010 hingga tahun 2012 jumlah pohon yang direboisasi meningkat. Selain dengan cara reboisasi, penghutanan kembali hutan kritis dilakukan dengan cara merehabilitasi hutan dan lahan. Realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan selama tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 luas hutan dan lahan yang direhabilitasi hanya seluas 165 hektar kemudian meningkat jadi 15.182 hektar pada tahun 2012.

Tabel 2.15. Kegiatan Penyelamatan Lingkungan, 2010-2012

Jenis Kegiatan	Tahun		
	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Realisasi Penanaman Satu Miliar Pohon (batang)	44 358 178	36 863 532	52 558 576
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	165	7 211	15 182
Rehabilitasi Hutan Bakau (Ha)	-	500	-
Pembuatan Kebun Bibit Desa (1.000 batang)	-	-	-
Pembuatan Sumur Resapan (unit)	-	-	-
Pembuatan Dam Pengendali/Penahan (unit)	-	-	-

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2012, Kementerian Kehutanan

Rehabilitasi hutan bakau juga terus dilakukan, sebab hutan bakau memiliki nilai penting untuk perlindungan pantai, penahan endapan lumpur, dan penyeimbang lingkungan. Pada tahun 2011 lalu dilakukan rehabilitasi hutan bakau seluas 500 hektar.

Pada program rehabilitasi hutan, misalnya rehabilitasi hutan mangrove diperlukan berbagai bibit tanaman. Bibit tersebut diantaranya diperoleh dari Kebun Bibit Desa (KBD). KBD adalah unit persemaian yang tidak permanen berupa kebun pembibitan untuk tanaman penghijauan yang dibuat oleh kelompok tani di sekitar desa.

Lingkungan buatan yang berfungsi sebagai penyangga cadangan air tanah dalam kawasan hutan adalah dam pengendali/dam penahan. Dam pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air dengan konstruksi timbunan tanah, timbunan tanah dengan lapisan kedap air atau konstruksi beton untuk mengendalikan erosi dan banjir, dibuat pada alur jurang/sungai kecil dengan tinggi maksimum 8 meter. Manfaat dam pengendali antara lain dapat mengendalikan aliran yang ada di permukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulunya dan berfungsi pula sebagai sumber air bagi masyarakat dan irigasi. Sedangkan dam penahan adalah bendungan kecil dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 meter, yang bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatkan permukaan air tanah di bagian hilirnya.

2.4.3. Limbah Padat

Limbah berpotensi sebagai penahan kondisi lingkungan termasuk tanah, air, udara, dan lingkungan. Tekanan terhadap lingkungan pada umumnya disebabkan oleh cara penanganan dan pengendapan limbah. Limbah dihasilkan dari setiap tahap aktivitas manusia. Komposisi dan jumlahnya sangat tergantung pada pola konsumsi dan produksi. Kekhawatiran utama antara lain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan (baik tanah, air, dan keindahan).

Pengelolaan limbah merupakan inti permasalahan lingkungan. Respon yang ditetapkan terkait pengelolaan pengumpulan dan pembuangan limbah. Strategi pengelolaan limbah yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dicapai melalui pencegahan limbah, penggunaan kembali, daur ulang, dan memperbaiki limbah.

Produksi dan volume sampah yang dapat terangkut per hari di ibukota provinsi tahun 2013-2014 disajikan pada Tabel 2.16. Produksi sampah per hari terus mengalami peningkatan sehingga diharapkan volume sampah yang terangkut juga dapat mengalami peningkatan. Produksi sampah yang tinggi bila tidak disertai dengan penanggulangannya akan menimbulkan polusi. Apalagi dengan semakin berkurangnya jumlah TPS yang semula 154 unit menjadi 139 unit.

Tabel 2.16. Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut Per Hari serta Sarana Dinas Kebersihan di Kota Palangka Raya, 2013-2014

Produksi, Volume Sampah yang Terangkut per Hari, dan Sarana Dinas Kebersihan	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Perkiraan Produksi Sampah Per Hari (m ³)	695,00	697,00
Volume Sampah yang Terangkut Per Hari (m ³)	430,00	438,00
Persentase yang Tertanggulangi	61,87	62,84
Sarana Dinas Kebersihan: Pegawai (orang)	309	327
Truk Sampah (unit)	21	21
TPS (unit)	154	139
Alat-alat Berat (unit)	23	23

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Palangka Raya

Suara mesin pabrik dan kendaraan bermotor merupakan salah satu gangguan bagi masyarakat, selain bau sampah dan asap kendaraan bermotor.

Polusi bunyi merupakan polusi paling banyak dirasakan masyarakat. Bila gangguan lingkungan dikelompokkan berdasar media lingkungan (air, tanah, dan udara), maka gangguan air adalah gangguan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat, sedangkan gangguan tanah dan udara cenderung turun (Tabel 2.17).

Tabel 2.17. Persentase Desa yang Mengalami Gangguan Lingkungan dan Mengadu ke Kepala Desa Menurut Jenis Gangguan, 2005- 2011

Jenis Gangguan	Tahun		
	2005	2008	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Air	18,58	7,04	11,58
Tanah	1,70	0,21	0,59
Udara	8,36	3,45	1,44

Sumber: Statistik Potensi Desa 2005, 2008, dan 2011, Badan Pusat Statistik

2.4.4. Transportasi

Transportasi merupakan komponen utama dari aktivitas ekonomi, baik bagi sektor ekonomi sendiri maupun sebagai faktor input bagi aktivitas ekonomi yang lain. Transportasi menimbulkan efek negatif bagi lingkungan seperti polusi udara yang terdapat di daerah perkotaan dimana kemacetan sering terjadi. Transportasi darat juga berkontribusi terhadap polusi regional maupun global seperti hujan asam dan perubahan iklim. Data dan informasi jumlah kendaraan bermotor selama tahun 2010 hingga 2013 disajikan pada Tabel 2.18. Jumlah kendaraan bermotor selama periode tersebut terus mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan bermotor terbanyak adalah sepeda motor.

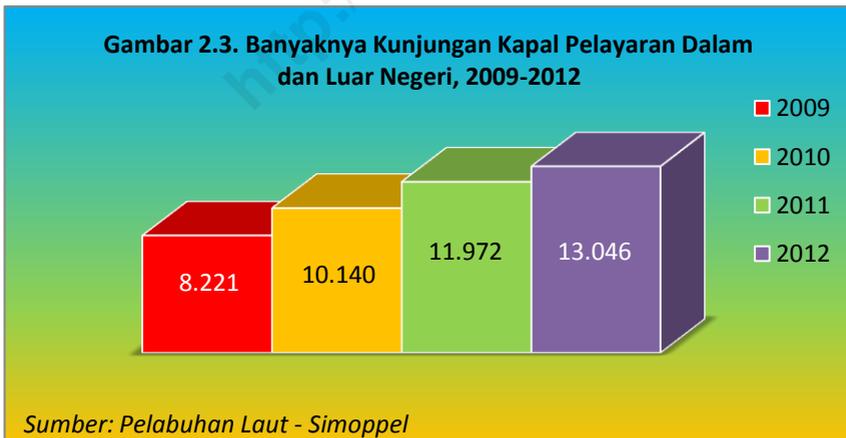
Tabel 2.18. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Bermotor, 2010-2013

Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun			
	2010	2011	2012	2013*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mobil Penumpang	184 830	196 510	202 091	213 865
Mobil Bis	66 372	66 494	66 609	66 865
Mobil Truk	71 321	75 458	82 413	90 162
Sepeda Motor	523 946	592 626	721 031	893 952

*) Angka sementara

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia

Sementara itu Gambar 2.3 menyajikan data banyaknya kunjungan kapal pelayaran dalam dan luar negeri. Selama periode 2009-2012 banyaknya kunjungan kapal pelayaran dalam dan luar negeri terus mengalami peningkatan, dari 8.221 unit tahun 2009 menjadi 13.046 unit pada tahun 2012.



2.4.5. Perumahan

Indikator yang termasuk dalam kategori perumahan mengacu pada kualitas perumahan atau sarana dan prasarana dasar pemukiman yang layak. Indikator perumahan dapat menjelaskan masalah lingkungan terkait pencemaran air dan tanah, misalnya tidak tersedianya sarana dan prasarana dasar pemukiman penduduk, antara lain kurangnya fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) atau fasilitas pengelolaan air limbah domestik.

Di daerah perkotaan, lingkungan kumuh dan rumah tak layak huni merupakan masalah utama bidang perumahan dan lingkungan. Ketiadaan perumahan yang terjangkau dan tingginya migrasi dari desa ke kota memicu kepadatan perumahan yang tinggi dan menimbulkan lingkungan kumuh. Daerah-daerah padat seperti ini seringkali mengakibatkan ketegangan, kejahatan, dan kerusuhan.

Tabel 2.19. Jumlah Rumah yang Dibangun oleh Perumnas Menurut Jenis Rumah, 2010-2012

Jenis Rumah	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sangat Sehat (RSS) + Rumah Siap Huni (RSH)	11	181	288	187
Rumah Sederhana (RS) > 27	-	1	10	34
Jumlah	11	182	298	221

Sumber: Perum Perumnas

Tabel 2.19 menunjukkan jumlah rumah yang dibangun oleh Perumnas dari tahun 2010 hingga 2013. Perum Perumnas membagi menjadi dua jenis rumah, yaitu rumah sangat sehat (RSS) dan rumah siap huni (RSH) serta rumah sederhana (RS) yang luasnya lebih dari 27m². Jumlah rumah yang dibangun

oleh perumnas mengalami peningkatan dari 11 unit pada tahun 2010 menjadi 221 unit pada tahun 2012.

Tabel 2.20. Jumlah dan Persentase Desa Menurut Keberadaan Keluarga yang Tinggal di Bantaran Sungai dan di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, 2011

Keberadaan Keluarga	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Keluarga Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai	969	63,42
Keluarga Tinggal di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	-	-

Sumber: Potensi Desa 2011, Badan Pusat Statistik

Lokasi menentukan sehat atau layak tidaknya perumahan atau pemukiman penduduk. Rumah yang didirikan di daerah marginal, seperti bantaran sungai, di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, atau di tempat-tempat kumuh merupakan rumah cenderung tidak sehat dan tidak layak huni. Tabel 2.20 menunjukkan jumlah dan persentase desa yang penduduknya masih ada yang tinggal di daerah marginal. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari separuh jumlah desa di Kalimantan Tengah ada keluarga yang tinggal di bantaran/tepi sungai yang mencapai 63,42 persen. Selain masalah lokasi, bangunan fisik perumahan penduduk juga menentukan rumah layak huni/sehat atau tidak.

Persentase rumah tangga dengan dinding terluas terbuat bukan dari tembok dan kayu pada tahun 2011 hingga 2014 kalau kita lihat persentasenya sangat kecil berkisar satu persen. Dimana pada tahun 2011 sebesar 1,07 persen menjadi 0,97 persen tahun 2012 dan 1,45 persen pada tahun 2013, kemudian 1,18 persen tahun 2014. Begitu juga dengan persentase rumah tangga dengan atap terluas terbuat dari ijuk, daun-daunan dan lainnya yang mengalami penurunan selama periode 2011-2014, yaitu dari 5,85 persen pada

tahun 2011 menjadi 4,86 persen tahun 2012 dan 4,57 persen pada tahun 2013 kemudian menjadi 3,05 persen tahun 2014. Sementara persentase rumah tangga dengan lantai terbuat dari tanah mengalami peningkatan dari 0,90 persen pada tahun 2011 menjadi 0,92 persen pada tahun 2014 (Tabel 2.21).

Tabel 2.21. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan, 2011-2014

Fasilitas Perumahan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinding Terluas Terbuat Bukan dari Tembok dan Kayu	1,07	0,97	1,45	1,18
Atap Terluas Terbuat dari Ijuk, Daun-daunan, dan Lainnya	5,85	4,86	4,57	3,05
Lantai Terluas dari Tanah/Lainnya	0,90	0,83	1,15	0,92
Luas Lantai Perkapita Kurang dari 7,2 m ²	14,73	13,60	12,58	12,79
Penampungan Akhir Tinja Bukan Tangki Septik	62,61	57,87	59,29	67,35
Memiliki Akses Sanitasi Layak	34,26	38,99	37,50	30,85
Memiliki Akses Air Minum Layak	49,46	52,28	54,10	56,05

Sumber: Susenas 2011-2014, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Ketika membangun perumahan harus memperhatikan masalah kesehatan lingkungan dengan cara membuat sanitasi lingkungan, berupa got atau selokan, sumur resapan dan tempat pembuangan akhir tinja. Tempat pembuangan akhir tinja bukan tangki septik akan menjadi masalah bagi kesehatan lingkungan perumahan atau pemukiman penduduk.

Masalah kesehatan lingkungan perumahan atau pemukiman penduduk lainnya adalah jarak antara sumber air minum dengan penampungan kotoran terdekat. Semakin dekat jaraknya akan semakin buruk untuk kesehatan. Standar jaraknya yang direkomendasikan organisasi kesehatan dunia (WHO)

minimum 10 meter. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dengan jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Selama periode 2012-2014 persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terus mengalami penurunan dari 38,99 persen menjadi 30,85 persen.

Kesehatan lingkungan perumahan dan pemukiman juga ditentukan oleh penggunaan air bersih. Semakin tinggi persentase pengguna air bersih semakin baik dan sehat, sementara semakin rendah persentasenya maka tidak baik dan kurang sehat. Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak ≥ 10 m dari penampungan kotoran/limbah, dan air hujan yang dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi (air terlindungi dengan jarak < 10 m dan air tidak terlindungi). Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak selama periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan, dari 49,46 persen terus meningkat menjadi 56,05 persen.

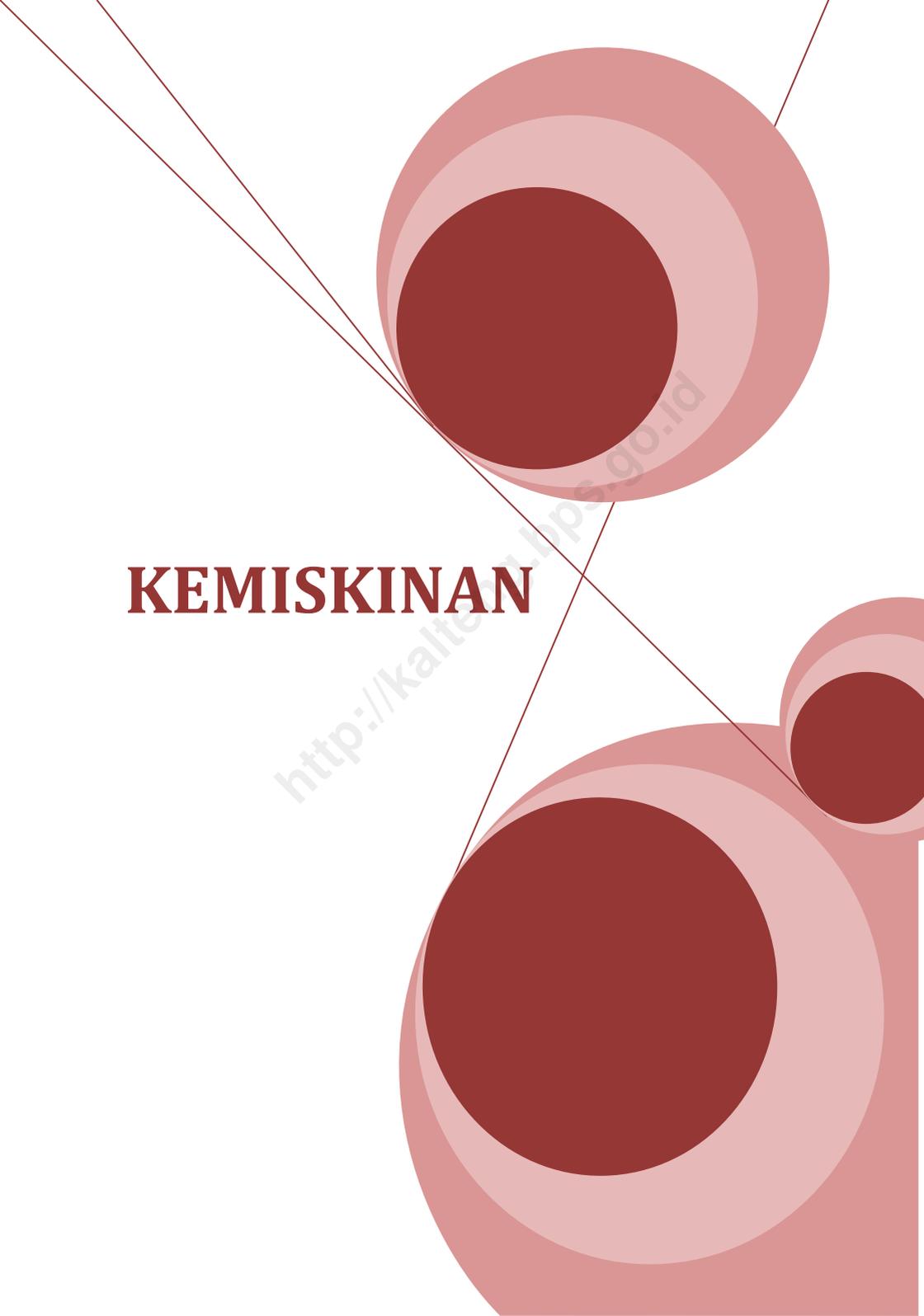
Persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama untuk memasak dan sumber penerangan selama tahun 2011 hingga tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.22. Penggunaan bahan bakar gas pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 4,59 persen pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 16,65 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah mengalami penurunan dari 42,08 persen menjadi 39,41 persen. Dari tabel tersebut

terlihat juga bahwa hanya sedikit rumah tangga yang menggunakan bahan bakar arang/briket. Persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar kayu juga terus mengalami penurunan dari 54,00 persen menjadi 42,72 persen. Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik meningkat sedangkan yang sumber penerangannya petromak/aladin/pelita/sentir/obor mengalami penurunan.

Tabel 2.22. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Sumber Penerangan, 2011-2014

Bahan Bakar dan Sumber Penerangan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bahan Bakar Utama untuk Memasak				
❖ Listrik	1,08	0,33	0,66	0,36
❖ Gas/Elpiji	4,59	6,87	9,34	16,65
❖ Minyak Tanah	39,43	40,44	42,08	39,41
❖ Arang/Briket	0,08	0,00	0,00	0,05
❖ Kayu	54,00	52,21	47,39	42,72
❖ Lainnya (Termasuk yang Tidak Memasak)	0,83	0,15	0,53	0,82
Sumber Penerangan				
❖ Listrik PLN	66,16	68,84	72,83	73,74
❖ Listrik Non PLN	14,58	13,65	14,65	17,61
❖ Petromak/Aladin	2,36	1,60	0,88	0,74
❖ Pelita/Sentir/Obor	16,36	14,33	10,54	7,26
❖ Lainnya	0,54	1,59	1,10	0,66

Sumber: Susenas 2011-2014, BPS Provinsi Kalimantan Tengah



KEMISKINAN

<http://kalteknologi.blogspot.com>

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi pada seluruh negara yang tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas, khususnya pada negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang senantiasa dihadapkan dengan peliknya permasalahan kemiskinan ini. Maka tak heran bila permasalahan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Meskipun pemerintah telah menggulirkan berbagai program yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, namun masih ada program-program pemerintah yang dianggap masih belum tepat sasaran dan bahkan belum berhasil dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan program tersebut belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya belum efektif. Selain itu, program yang ada juga dinilai masih bersifat reaktif, jangka pendek, dan parsial.

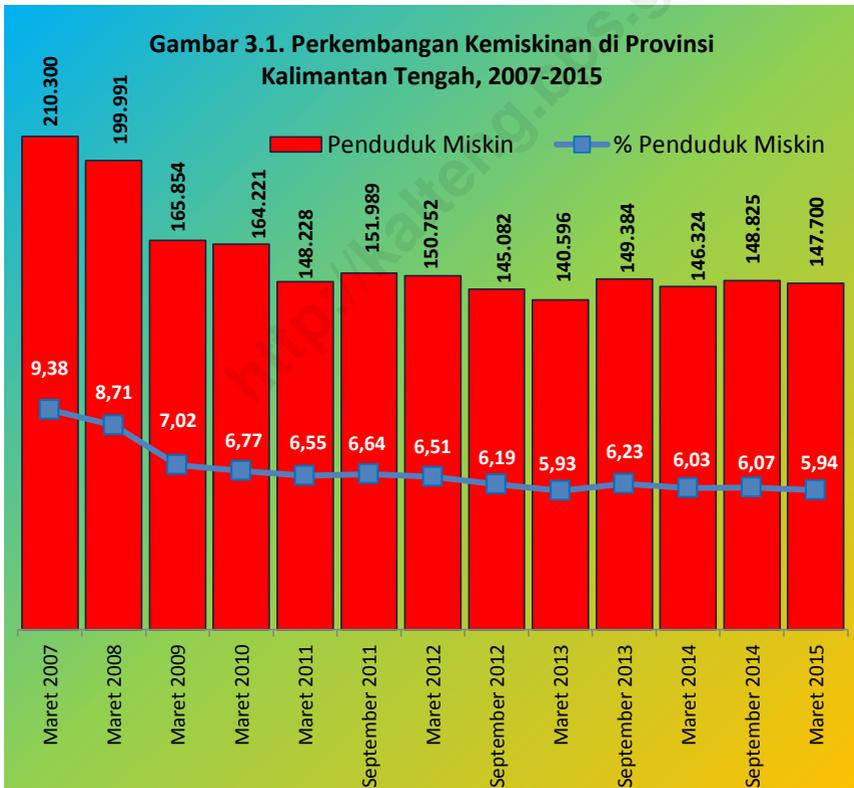
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Metode yang digunakan yaitu dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah pada Maret 2015 mencapai 147.700 orang (5,94 persen), berkurang 1.125 orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang berjumlah 148.825 orang (6,07 persen).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2014 – Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 1.871 orang (0,11 persen) sedangkan daerah perdesaan berkurang 2.996 orang (0,24 persen).



Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2007-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2007	51 200	159 100	210 300	6,72	10,76	9,38
Maret 2008	45 345	154 646	199 991	5,81	10,20	8,71
Maret 2009	35 775	130 079	165 854	4,45	8,34	7,02
Maret 2010	33 229	130 992	164 221	4,03	8,19	6,77
Maret 2011	29 625	118 603	148 228	3,91	7,89	6,55
Sept 2011	28 660	123 329	151 989	3,74	8,10	6,64
Maret 2012	32 977	117 775	150 752	4,25	7,64	6,51
Sept 2012	33 032	112 050	145 082	4,21	7,19	6,19
Maret 2013	34 113	106 483	140 596	4,30	6,75	5,93
Sept 2013	47 023	102 361	149 384	5,80	6,45	6,23
Maret 2014	40 779	105 545	146 324	4,98	6,57	6,03
Sept 2014	39 452	109 373	148 825	4,75	6,74	6,07
Maret 2015	41 323	106 377	147 700	4,86	6,50	5,94

Sumber: Diolah dari data Susenas 2007-2014

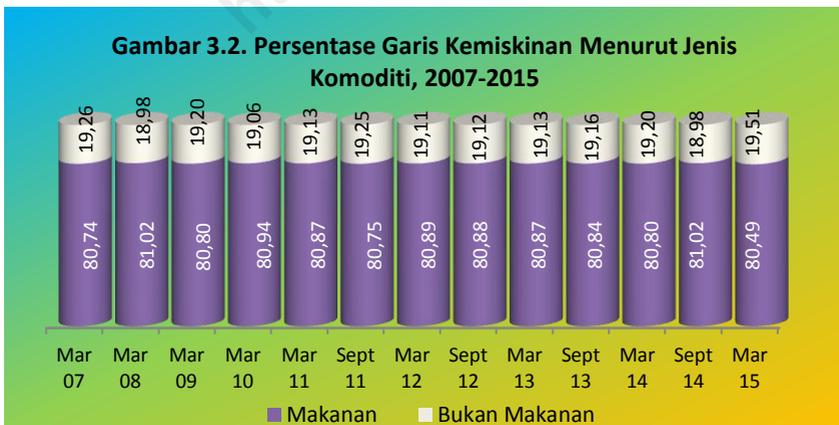
3.2. Perubahan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jadi besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per

kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah rata-rata pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Selama September 2014 – Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,70 persen, yaitu dari Rp 330.869,- per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp 349.727,- per kapita per bulan pada Maret 2015 (Tabel 2). Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2015, sumbangan GKM terhadap GK cukup besar, yaitu 80,49 persen, sedangkan GKBM hanya sebesar 19,51 persen saja.



Tabel 3.2. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Komoditi, 2007-2015

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2007	128 326	41 182	179 418
Maret 2008	152 258	44 095	196 354
Maret 2009	161 654	47 663	209 317
Maret 2010	170 973	49 685	220 658
Maret 2011	188 302	56 010	244 312
September 2011	200 002	59 915	259 917
Maret 2012	207 474	61 102	268 576
September 2012	212 108	62 114	274 222
Maret 2013	221 396	65 937	287 333
September 2013	232091	67 879	299 970
Maret 2014	236 203	71 179	307 382
September 2014	244 768	71 915	316 683
Maret 2015	251 976	76 698	328 674
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2007	127 294	21 136	152 430
Maret 2008	149 908	30 762	180 671
Maret 2009	164 763	34 394	199 157
Maret 2010	176 147	36 643	212 790
Maret 2011	198 873	41 248	240 121
September 2011	210 393	44 006	254 399
Maret 2012	223 813	46 812	270 626
September 2012	230 532	48 476	279 008
Maret 2013	246 659	51 513	298 172
September 2013	257 268	54 380	311 647
Maret 2014	267 629	55 927	323 556
September 2014	279 993	58 137	338 130
Maret 2015	296 856	63 814	360 670

Lanjutan Tabel 3.2

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kota + Desa</i>			
Maret 2007	131 014	31 251	162 266
Maret 2008	150 707	35 296	186 003
Maret 2009	163 706	38 906	202 612
Maret 2010	174 388	41 077	215 466
Maret 2011	195 332	46 193	241 525
September 2011	206 917	49 328	256 245
Maret 2012	218 345	51 594	269 940
September 2012	224 367	53 039	277 407
Maret 2013	238 201	56 342	294 543
September 2013	248 753	58 945	307 698
Maret 2014	257 016	61 078	318 094
September 2014	268 067	62 802	330 869
Maret 2015	281 506	68 220	349 727

Sumber: Diolah dari data Susenas 2007-2015

3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2007-2015

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</i>			
Maret 2007	0,980	2,040	1,680
Maret 2008	0,898	1,760	1,467
Maret 2009	0,616	1,238	1,027
Maret 2010	0,861	1,098	1,018
Maret 2011	0,823	1,071	0,988
September 2011	0,666	1,309	1,094
Maret 2012	0,572	1,286	1,047
September 2012	0,919	1,158	1,078
Maret 2013	0,631	0,982	0,864
September 2013	0,380	1,342	1,016
Maret 2014	0,795	0,724	0,748
September 2014	0,444	1,237	0,968
Maret 2015	0,729	0,968	0,886
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</i>			
Maret 2007	0,380	0,570	0,510
Maret 2008	0,186	0,462	0,368
Maret 2009	0,130	0,270	0,222
Maret 2010	0,236	0,238	0,238
Maret 2011	0,264	0,231	0,242
September 2011	0,184	0,335	0,285
Maret 2012	0,128	0,322	0,257
September 2012	0,251	0,273	0,266
Maret 2013	0,135	0,219	0,191
September 2013	0,037	0,441	0,305
Maret 2014	0,189	0,153	0,165
September 2014	0,066	0,342	0,248
Maret 2015	0,173	0,235	0,214

Sumber: Diolah dari data Susenas 2007-2015

Pada periode September 2014 – Maret 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,968 menjadi 0,886. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) turun dari 0,248 menjadi 0,214 pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan hanya 0,729 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,968. Begitu juga nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan hanya 0,173 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,235. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dari daerah perkotaan.

3.4. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan

Jika kita bandingkan persentase penduduk miskin menurut provinsi yang ada di Pulau Kalimantan pada Maret 2015, tampak bahwa persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 8,03 persen, sementara persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,99 persen. Dilihat dari jumlah penduduk, sebagian besar penduduk miskin berada di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 383.702 orang, sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di Provinsi Kalimantan Utara hanya berjumlah 39.686 orang.

Tabel 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan, 2015

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kalimantan Barat	82 050	301 652	383 702	5,62	9,09	8,03
Kalimantan Tengah	41 323	106 377	147 700	4,86	6,50	5,94
Kalimantan Selatan	65 958	132 478	198 436	3,91	5,78	4,99
Kalimantan Timur	86 822	126 064	212 886	4,03	9,96	6,23
Kalimantan Utara	13 051	26 635	39 686	3,67	9,49	6,24

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2015

INDEKS DEMOKRASI

<http://kalteng.lps.go.id>

4. Indeks Demokrasi

Indeks demokrasi adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di provinsi berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di provinsi. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan indeks ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator.

Indeks demokrasi bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen yang lain tidak diperhatikan. Dalam rangka menyusun indeks demokrasi untuk tahun 2009 ditetapkan tiga aspek seperti yang telah disebutkan di atas dengan 11 variabel dan 28 indikator. Penentuan semua ini dilakukan berdasarkan signifikansi semua komponen tersebut dalam menentukan perkembangan demokrasi.

4.1. Latar Belakang

Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa

Indonesia untuk kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang.

Gerakan demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh massa rakyat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan berbicara dan berserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokratisasi tersebut meskipun peraturan perundangan yang berlaku bisa digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja, umpamanya, melarang pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan Golongan Karya yang hanya mengakui dua partai politik dan satu Golongan Karya. Tentu saja pemerintah tidak mau mengambil resiko bertentangan dengan rakyat sehingga pemerintah membiarkan demokratisasi bergerak sesuai dengan keinginan rakyat. Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Langkah selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia.

Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dilakukan bersamaan dengan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Tidak lama setelah UU Politik dikeluarkan, diterbitkan pula UU Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat

pusat dengan segera diikuti oleh daerahdaerah. Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 juga telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah.

Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabupaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi DPRD sehingga lembaga wakil rakyat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” seperti yang disebutkan dalam UU Pemda yang dihasilkan selama masa Orde Baru. DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan gubernur sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.

Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia. Rakyat semakin menyadari Hak-hak mereka sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Demokratisasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerah-daerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk sistem politik demokratis yang memberikan Hak-hak yang luas

kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

4.2. Arti Penting dan Manfaat Indeks Demokrasi

Setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia berusaha menegakkan demokrasi, sangat menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas. Sudah saatnya perkembangan demokrasi yang sangat beragam di berbagai provinsi di Indonesia diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pengukuran secara kuantitatif akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi. Di samping itu tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan provinsi dengan tingkat perkembangan demokrasi yang paling baik dan yang paling buruk.

Gambaran yang diperoleh dari indeks demokrasi mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data-data yang diperoleh dari indeks demokrasi dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Adanya indeks demokrasi merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh indeks demokrasi mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Selama ini pembangunan ekonomi telah memiliki tolok ukur yang jelas dan kuantitatif bagi perkembangan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan ekonomi. Indeks demokrasi dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangannya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh indeks demokrasi berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

4.3. Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi

Indeks demokrasi adalah suatu indeks komposit yang dibangun berdasarkan tiga aspek yang terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Tiga aspek

komponen indeks demokrasi terdiri atas Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga-lembaga Demokrasi.

A. Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

I. Kebebasan berkumpul dan berserikat, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 1) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat;
- 2) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

II. Kebebasan berpendapat, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 3) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat;
- 4) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

III. Kebebasan berkeyakinan, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 5) Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya;
- 6) Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya;
- 7) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

IV. Kebebasan dari diskriminasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 8) Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya;
- 9) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya;

- 10) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

B. Aspek Hak-hak Politik (*Political Rights*)

V. Hak memilih dan dipilih, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 11) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- 12) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- 13) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- 14) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout);
- 15) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi.

VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 16) Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok;
- 17) Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

C. Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

VII. Pemilu yang bebas dan adil, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 18) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu;
- 19) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

VIII. Peran DPRD, dengan indikator-indikator sebagai berikut::

- 20) Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD;
- 21) Persentase Kejadian perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap Kejadian total perda yang dihasilkan;

- 22) Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
- IX. Peran Partai Politik, dengan indikator-indikator sebagai berikut::
- 23) Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu;
 - 24) Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
- X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan indikator-indikator sebagai berikut::
- 25) Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif;
 - 26) Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.
- XI. Peran Peradilan yang Independen, dengan indikator-indikator sebagai berikut::
- 27) Kejadian keputusan hakim yang kontroversial;
 - 28) Kejadian penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

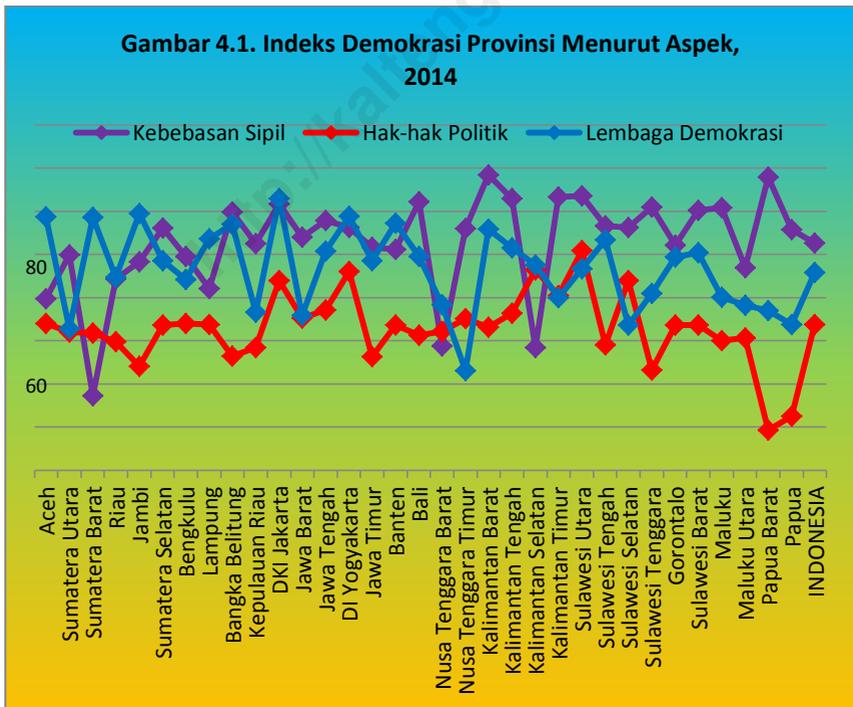
4.4. Indeks Demokrasi Provinsi Menurut Aspek

Pola umum indeks pada tingkat nasional relatif konsisten dengan kecenderungan yang terjadi pada tingkat provinsi seperti nampak pada Gambar 4.1. Grafik ini secara eksplisit mengisyaratkan kecenderungan aspek Kebebasan Sipil yang memiliki indeks tertinggi dibandingkan dua aspek lainnya (Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi). Hal ini terjadi hampir secara merata di seluruh provinsi. Hanya pada tiga provinsi saja dimana indeks aspek Kebebasan Sipil berada di bawah indeks dua aspek yang lain, bahkan kualitas capaiannya buruk, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Di Aceh, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta,

dan Banten indeks aspek Kebebasan Sipil berada di bawah indeks aspek Lembaga Demokrasi namun di atas indeks aspek Hak-hak Politik.

Indeks aspek Lembaga Demokrasi dengan kualitas capaian buruk hanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (53,12). Sedangkan indeks aspek Hak-hak Politik dengan kualitas capaian buruk terjadi di Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua.

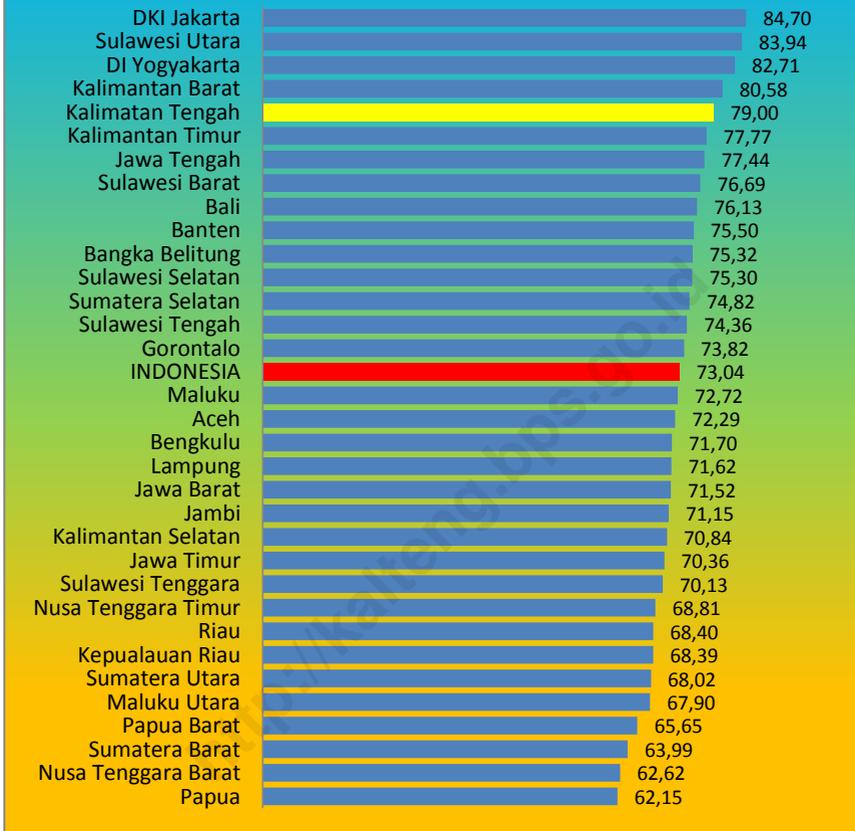
Secara keseluruhan dapat dikemukakan, penyebaran Indeks Demokrasi Provinsi menurut tiga aspek pada Gambar 4.1, semakin mempertegas bahwa sejauh ini Indonesia relatif berhasil dalam membangun kebebasan sipil, namun relatif tertinggal dalam hal memfungsikan lembaga demokrasi dan mengaktualisasi Hak-hak politik.



4.5. Indeks Demokrasi di 33 Provinsi

Informasi secara lengkap tentang indeks demokrasi secara keseluruhan pada 33 provinsi di Indonesia disajikan pada Gambar 4.2. Bila dicermati visualisasi angka-angka indeks pada Gambar 4.2. tersebut, terlihat dengan jelas hanya 4 provinsi di Indonesia memiliki indeks dengan kategori baik (indeks >80), yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Provinsi yang mempunyai skor IDI paling besar adalah DKI Jakarta, dengan nilai indeks 84,70. Sementara provinsi dengan skor IDI paling rendah adalah Papua dengan nilai indeks 62,15. Bila dibandingkan dengan Indeks Demokrasi Nasional, secara kuantitas, memang terlihat bahwa Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah (79,00) berada di atas Indeks Demokrasi Nasional (73,04), namun demikian tetap termasuk pada kategori sedang (indeks 60-80).

Gambar 4.2. Indeks Demokrasi Provinsi, 2014



Lebih jauh, ketika indeks keseluruhan pada Provinsi Kalimantan Tengah didisagregasi berdasarkan kontribusi indeks tiga aspek indeks demokrasi, terlihat dengan jelas bahwa aspek Kebebasan Sipil merupakan penyumbang indeks paling tinggi (92,93), kemudian diikuti oleh aspek Lembaga Demokrasi (81,48), dan aspek Hak-hak Politik (66,42) sebagaimana terlihat pada Tabel 4. Kecenderungan sebaliknya terjadi pada Provinsi Papua yang merupakan provinsi dengan indeks demokrasi terendah. Kontribusi indeks aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi pada provinsi ini masing-masing

hanya sebesar 85,69 dan 63,75. Sementara aspek Hak-hak Politik merupakan penyumbang indeks terkecil, yaitu 42,51.

Konfigurasi angka-angka indeks seperti dikemukakan di atas jelas memperlihatkan, untuk Provinsi Kalimantan Tengah, kontribusi indeks aspek Kebebasan Sipil memegang peranan sangat penting dalam menopang indeks keseluruhan sebesar 79,00. Sementara Provinsi Papua dengan Indeks Demokrasi terendah (62,15), antara lain disebabkan relatif rendahnya kontribusi indeks aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi.

Tabel 4. Indeks Aspek pada Provinsi dengan Indeks Demokrasi Tertinggi dan Terendah, 2014

Provinsi	Indeks Demokrasi	Indeks Aspek		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta (Provinsi dengan Indeks Demokrasi Tertinggi)	84,70	91,72	73,94	92,97
Kalimantan Tengah	79,00	92,93	66,42	81,48
Papua (Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terendah)	62,15	85,69	42,51	63,75

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia, 2014

<http://kalteng.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Kapten Piere Tendean No. 06, Palangka Raya, 73112
Telp (0536) 3228105, Faks (0536) 3221380, Email : bps6200@bps.go.id
Homepage : <http://kalteng.bps.go.id>

